



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 18 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta dalam mendukung penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, perlu diatur Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa Kode Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
10. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SRIKANDI adalah aplikasi umum Bidang Kearsipan Dinamis yang telah ditetapkan dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
13. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di instansinya.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi instansi.
15. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
16. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
17. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
18. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
19. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

20. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau LKD.
21. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
22. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
23. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
24. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
25. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu Arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.
26. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
27. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
28. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
29. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
30. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
31. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
32. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
33. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
34. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
35. Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
36. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.

37. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
38. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
39. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
40. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
41. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
42. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
43. Tingkat klasifikasi keamanan akses arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. instrumen pengelolaan Arsip Dinamis bagi Perangkat Daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi arsip, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip; dan
 - c. menjadi pedoman dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar:
 - a. terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip;
 - b. sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan; dan
 - c. terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kode Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip, yakni fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.
- (2) Adapun fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. perlengkapan;
 - c. pengadaan;
 - d. perpustakaan;
 - e. kearsipan;

- f. persandian;
 - g. perencanaan pembangunan;
 - h. organisasi dan tata laksana;
 - i. penelitian pengkajian, dan pengembangan;
 - j. hukum;
 - k. hubungan masyarakat;
 - l. pengawasan internal;
 - m. sumber daya manusia;
 - n. pendidikan dan pelatihan; dan
 - o. keuangan daerah.
- (3) Adapun fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan :
- a. otonomi daerah;
 - b. pemerintahan umum;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. satuan polisi pamong praja;
 - e. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pendidikan;
 - h. keolahragaan;
 - i. kepemudaan;
 - j. kebudayaan;
 - k. kesehatan;
 - l. sosial;
 - m. pemberdayaan masyarakat desa;
 - n. pertamanan dan pemakaman;
 - o. kependudukan dan catatan sipil;
 - p. keluarga berencana;
 - q. ketahanan pangan;
 - r. perdagangan;
 - s. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - t. perikanan;
 - u. pertanian;
 - v. peternakan;
 - w. perkebunan;
 - x. perindustrian;
 - y. perhubungan;
 - z. komunikasi dan informatika;
 - aa. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - bb. statistik;
 - cc. ketenagakerjaan;
 - dd. penanaman modal;
 - ee. pertanahan;
 - ff. transmigrasi;
 - gg. pekerjaan umum;
 - hh. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - ii. tata ruang (tata kota); dan
 - jj. lingkungan hidup;
- (4) Ruang Lingkup Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
 - b. pengaturan akses arsip.

BAB IV
KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Kode klasifikasi arsip yang digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (*numeric*).
- (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

- (1) JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 51 (lima puluh satu) urusan.
- (3) JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan.
- (4) Ketentuan mengenai JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

- a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. perlengkapan;
- c. pengadaan;
- d. perpustakaan;
- e. kearsipan;
- f. persandian;
- g. perencanaan pembangunan;
- h. organisasi dan tata laksana;
- i. penelitian pengkajian, dan pengembangan;
- j. hukum;
- k. hubungan masyarakat;
- l. pengawasan internal;
- m. sumber daya manusia;
- n. pendidikan dan pelatihan;
- o. keuangan daerah;
- p. otonomi daerah;
- q. pemerintahan umum;
- r. kesatuan bangsa dan politik;
- s. satuan polisi pamong praja;
- t. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan;
- u. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- v. pendidikan;
- w. keolahragaan;
- x. kepemudaan;
- y. kebudayaan;
- z. kesehatan;
- aa. sosial;
- bb. pemberdayaan masyarakat desa;
- cc. pertamanan dan pemakaman;

- dd. kependudukan dan catatan sipil;
- ee. keluarga berencana;
- ff. ketahanan pangan;
- gg. perdagangan;
- hh. koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii. perikanan;
- jj. pertanian;
- kk. peternakan;
- ll. perkebunan;
- mm. perindustrian;
- nn. perhubungan;
- oo. komunikasi dan informatika;
- pp. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- qq. statistik;
- rr. ketenagakerjaan;
- ss. penanaman modal;
- tt. pertanahan;
- uu. transmigrasi;
- vv. pekerjaan umum;
- ww. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- xx. tata ruang (tata kota); dan
- yy. lingkungan hidup;

Pasal 7

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. Retensi Arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (4) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

BAB VI SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 8

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 9

- (1) Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan arsip yang tercipta pada instansi pencipta arsip diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi, yaitu :
 - a. sangat rahasia;
 - b. rahasia;
 - c. terbatas; dan
 - d. biasa.
- (2) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 10

Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan :

- a. ketentuan hukum;
- b. analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (*job description*); dan
- c. analisis risiko.

BAB VII KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III; dan
 - c. pejabat eselon IV/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV.

Pasal 12

- (1) Arsip dinamis pemerintah daerah dapat diakses oleh pengguna internal dan pengguna eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Daerah/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. pimpinan tingkat, yaitu Kepala Sub Bidang, atau Sub Koordinator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan, yaitu staf, pelaksana, atau fungsional umum atau tertentu, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses dengan arsip dengan tingkat klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, yang terdapat pada Pimpinan Tingkat Tertinggi, Pimpinan Tingkat Tinggi, Pimpinan Tingkat menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapat izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara/proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 13

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000	UMUM			
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
		000.1.1	Telekomunikasi	
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	
		000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	
		000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
		000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
			000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
			000.1.8.2	Penghijauan
			000.1.8.3	Perbaikan Gedung
			000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
			000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan komputer	
			000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
			000.1.9.2	Pemasangan
		000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
			000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan

		000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
		000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
	000.2	PERLENGKAPAN		
		000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
			000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
			000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
			000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
		000.2.3	Distribusi	
			000.2.3.1	Barang habis pakai
			000.2.3.2	Barang milik daerah
		000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	
		000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	
	000.3	PENGADAAN		
		000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain:Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
		000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak	
		000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
		000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	
		000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa	
		000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	
	000.4	PERPUSTAKAAN		
		000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.4.2	Deposit Bahan Pustaka	
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

			000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
			000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
		000.4.3	Koleksi Pustaka	
			000.4.3.1	Pembelian
			000.4.3.2	Hibah
			000.4.3.3	Hadiah
			000.4.3.4	Tukar Menukar
			000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
			000.4.3.6	Terbitan Internal
			000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
			000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk
		000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
		000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
		000.4.6	Layanan Perpustakaan	
			000.4.6.1	Keanggotaan
			000.4.6.2	Peminjaman
			000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
		000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
			000.4.7.1	MoU
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
			000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
		000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
			000.4.8.1	Pengembangan situs web
			000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
			000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
			000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data keperustakaan digital
		000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
		000.4.10	Konservasi	
			000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
			000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
			000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
		000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto	
		000.4.12	Transformasi Digital	
		000.4.13	Kurasi Digital	
		000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
			000.4.14.1	Perpustakaan Umum
			000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
			000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
			000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
	000.5	KEARSIPAN		
		000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis

			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
			000.5.2.5	Data Base Arsiparis
			000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
			000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
			000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
			000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
			000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
			000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
		000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
			000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
			000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
			000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
			000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
			000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
		000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	

		000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	
		000.5.6	Penyusutan Arsip	
			000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
			000.5.6.3	Penyerahan arsip statis antara lain : Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan
		000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan	
		000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
		000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	
			000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan

			000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
			000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
		000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	
		000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	
		000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
		000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung	
		000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	
		000.5.15	Pengawasan Kearsipan	
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
			000.5.15.3	Sanksi
	000.6	PERSANDIAN		
		000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.6.2	Pengamanan persandian	
			000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
			000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
			000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
		000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
			000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
			000.6.3.2	Administrasi Pengkajian

			000.6.3.3	Pelaksanaan
			000.6.3.4	Pelaporan
		000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
			000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM
			000.6.4.12	Jaring Komunikasi
		000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
			000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
			000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
			000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
			000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
			000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
			000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat
			000.6.5.7	Pelaporan
	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
		000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan / Musrenbang	
			000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
			000.7.1.2	Musrenbang Nasional
			000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
			000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
			000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
			000.7.1.6	Musrenbang Desa
		000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	
			000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
			000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
			000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
			000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
			000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
			000.7.2.6	Program kerja tahunan
			000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
			000.7.2.8	Laporan Berkala
			000.7.2.9	Laporan Insidental
			000.7.2.10	Evaluasi Program
		000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
		000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
		000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
		000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
			000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
			000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah

			000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
	000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
		000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
			000.8.1.1	Pembentukan
			000.8.1.2	Pengubahan
			000.8.1.3	Pembubaran
		000.8.2	Uraian Jabatan	
			000.8.2.1	Analisa Jabatan
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
		000.8.3	Ketatalaksanaan	
			000.8.3.1	Proses Bisnis
			000.8.3.2	Standar Pelayanan
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
			000.8.3.4	Pelayanan Publik
		000.8.4	Standar Kompetensi jabatan dan struktural	
		000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	
		000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	
			000.8.6.1	Budaya Kerja
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah
	000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN		
		000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	
		000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi, penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi	
		000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	
		000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	
		000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
			000.9.6.1	Data

			000.9.6.2	Statistik
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian
		000.9.7	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	
		000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	
		000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	
100	PEMERINTAHAN			
	100.1	OTONOMI DAERAH		
		100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	
		100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
			100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM		
		100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama	
			100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
			100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
			100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
			100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
			100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
		100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	

			100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
			100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
			100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
			100.2.3.4	Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
			100.2.3.4	Pemeliharaan Batas Wilayah
	100.3	HUKUM		
		100.3.1	Program Legislasi	
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
			100.3.1.2	Program Legislasi
		100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	
		100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
			100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
			100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
			100.3.3.3	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
			100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
		100.3.4	Instruksi / Surat Edaran	
			100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
			100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
			100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
			100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
		100.3.5	Surat Perintah	
			100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
			100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
		100.3.6	Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	
		100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/Perjanjian kerja sama	
			100.3.7.1	Dalam Negeri
			100.3.7.2	Luar Negeri
		100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
		100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	

		100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
		100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
			100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara
			100.3.11.4	Perburuhan
			100.3.11.5	Arbitrase
			100.3.11.5	Sengketa Adat
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
			100.3.13.1	Hak Cipta
			100.3.13.2	Hak Paten
			100.3.13.3	Hak Desain Industri
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
			100.3.13.5	Hak Merk
		100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	
200	POLITIK			
	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.3	Bela Negara
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
		200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
			200.1.4.1	Ketahanan Seni
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
			200.1.4.6	Fasilitasi

			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Orma
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
		200.1.5	Politik Dalam Negeri	
			200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
			200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
			200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
			200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
			200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
			200.1.5.6	Pemerintah Daerah
			200.1.5.7	Database Parpol
			200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
			200.1.5.9	Pemilihan Umum
		200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
			200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
			200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
			200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
			200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
	200.2	Pemilu		
		200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
			200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
			200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS
			200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
			200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT
			200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
			200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
			200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
			200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
			200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual

		200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
			200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
			200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
			200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
		200.2.5	Pencalonan Pemilu	
			200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
			200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
			200.2.5.3	Daftar bakal calon
			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
		200.2.6	Kampanye Pemilu	
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
			200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
		200.2.7	Dana Kampanye	
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
		200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
			200.2.8.2	Master surat suara
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
		200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
		200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu

			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
		200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	
300	KEAMANAN			
	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
		300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
			300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
			300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
			300.1.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
			300.1.2.4	Perlindungan Masyarakat
			300.1.2.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			300.1.2.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN		
		300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
			300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
			300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensipencarian dan pertolongan
			300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
			300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
			300.2.2.6	Registrasi BEACON
		300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan	
			300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
			300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan
			300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

			300.2.5.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi Operasi Komunikasi	
		300.2.8	Operasi Komunikasi	
			300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
			300.2.8.3	Registrasi BEACON
		300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
		300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	
		300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	
		300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi	
			300.2.12.1	Laporan Harian
			300.2.12.2	Laporan Bulanan
			300.2.12.3	Laporan Tahunan
			300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		
		400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.3	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan

			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
			400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar

			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	
			400.2.2.1	Data Gender
			400.2.2.2	Advokasi dan Fasilitas
		400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi public untuk kesejahteraan ibu
		400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)	
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
		400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
			400.2.5.2	Pemenuhan Hak Anak
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

		400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE	
		400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
		400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
	400.3	PENDIDIKAN		
		400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak
			400.3.2.4	Block Grant
		400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
			400.3.3.2	Penyelenggaraan Program
			400.3.3.3	Pembinaan Program
			400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
			400.3.3.5	Pameran
			400.3.3.6	Rakor
			400.3.3.7	Sosialisasi
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
		400.3.4	Kursus /Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.5	Pendidikan dasar dan Menengah Pertama	
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
			400.3.5.2	Block Grant
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
		400.3.6	Pendidikan Khusus / Layanan Khusus	
			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
			400.3.6.2	Block Grant
			400.3.6.3	Lomba, festival
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.6.5	Pendataan
			400.3.6.6	Kelembagaan
		400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek

			400.3.7.7	Block Grant
		400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
			400.3.8.1	Kurikulum
			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	Block Grant
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
		400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
			400.3.9.1	Bahan ajar
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	Block grant
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11	Penilaian Pendidikan	
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12	Data dan statistic Pendidikan	
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi

	400.4	KEOLAHRAGAAN		
		400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
			400.4.3.1	Olahraga Massal
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
		400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10	Olahraga Prestasi	
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
		400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
	400.5	KEPEMUDAAN		
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	

			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.1	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.1	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
		400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
			400.5.5.1	Pengkajian
			400.5.5.2	Pengembangan
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi
		400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
			400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
		400.5.7.	Kewirausahaan	
			400.5.7.1	Kelembagaan
			400.5.7.2	Pengaderan
			400.5.7.3	Perintisan
		400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
		400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
			400.5.9.1	tandardisasi
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
		400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
			400.5.10.1	Kemitraan
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda

	400.6	KEBUDAYAAN		
		400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
			400.6.2.1	Registrasi Nasional
			400.6.2.2	Pelindungan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
		400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
		400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
			400.6.4.1	Sejarah
			400.6.4.2	Pemetaan nilai
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
		400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
			400.6.4.1	Internalisasi nilai budaya
			400.6.4.2	Kekayaan budaya
			400.6.4.3	Warisan budaya nasional dan dunia
			400.6.4.4	Diplomasi budaya
	400.7	KESEHATAN		
		400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
			400.7.2.7	infeksi menular lewat transfusi darah
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
			400.7.2.9	Pembiayaan darah
			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
			400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah

			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
		400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
		400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
		400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
			400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
			400.7.5.3	Radiologi
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
			400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
		400.7.6	Kesehatan Jiwa	
			400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya

			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
		400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
			400.7.7.2	Imunisasi
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
			400.7.7.4	Kesehatan matra
		400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
		400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
			400.7.9.1	Pengendalian malaria
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
		400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
			400.7.10.3	Penyakit kanker
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
		400.7.11	Penyehatan lingkungan	
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
		400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
		400.7.13	Gizi	
			400.7.13.1	Gizi makro
			400.7.13.2	Gizi mikro
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi

		400.7.14	Kesehatan Ibu	
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
			400.7.14.4	Keluarga berencana
			400.7.14.5	erlindungan kesehatan reproduksi
		400.7.15	Kesehatan Anak	
			4.00.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
			4.00.7.15.1	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
			4.00.7.15.1	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
			4.00.7.15.1	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
			4.00.7.15.1	Perlindungan kesehatan anak
		400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
		400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
			400.7.17.2	Kapasitas kerja
			400.7.17.3	Lingkungan kerja
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga
		400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
			400.7.18.1	Harga obat publik
			400.7.18.2	Pengadaan obat
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
		400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
			400.7.19.1	Alat kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
		400.7.20	Kefarmasian	
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
			400.7.20.2	Farmasi klinis
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
		400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
			400.7.21.1	Obat tradisional
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan

			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
		400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
			400.7.22.1	Surat keterangan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
		400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
		400.7.26	Kesehatan Haji	
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
		400.7.27	Promosi Kesehatan	
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
			400.7.27.4	Hari Kesehatan
		400.7.28	Data dan Informasi	
			400.7.28.1	Statistik kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
		400.7.29	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	

			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
		400.7.30	Pengawasana Berbahaya	Keamanan Pangan dan Bahan
			400.7.30.1	Penilaian Keamanan pangan
			400.7.30.2	Standarisasi produk pangan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertfikasi produk pangan
			400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
		400.7.31	Rekam Medis	
	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
		400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.8.2	Fasilitasi	
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.3	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
		400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
			400.8.3.1p	Kelembagaan dan kepercayaan
			400.8.3.1	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
			400.8.3.1	Komunitas Kepercayaan
			400.8.3.1	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
			400.8.3.1	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
	400.9	SOSIAL		
		400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan

			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
		400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
		400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
		400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
		400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
		400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
		400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
			400.9.9.3	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
		400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi

			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
			400.9.10.4	Kerjasama
		400.9.11	Jaminan Sosial	
			400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
			400.9.11.4	Kerjasama
		400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
		400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
		400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
			400.9.14.5	Bantuan Langsung
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
		400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
			400.9.15.3	Pengembangan kesetia kawan sosial

			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
			400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
			400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
		400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
		400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
			400.10.4.1	Budaya Nusantara
			400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
			400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
			400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
		400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
			400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
			400.10.5.2.	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
			400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
			400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
			400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
		400.10.6	Sumber Alam dan Tehnologi Tepat Guna Pedesaan	
			400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
			400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
			400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
			400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan

			400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Tehnologi Perdesaan
		400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
		400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.11.2	Pertamanan	
			400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
			400.11.2.2	Taman Kota
			400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen
		400.11.3	Pemakaman	
			400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
			400.11.3.2	Pemakaman
			400.11.3.4	Pelayanan Pemakaman
		400.11.4	Jalur Hijau	
			400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
			400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
			400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
		400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
		400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
		400.11.7	Pengelolaan Data	
		400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
	400.11	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
		400.11.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.11.2	Pendaftaran Penduduk	
			400.11.2.1	Identitas Penduduk
			400.11.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
			400.11.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
			400.11.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
			400.11.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.11.3	Pencatatan Sipil	
			400.11.3.1	Kelahiran dan Kematian
			400.11.3.2	Perkawinan dan Perceraian
			400.11.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
			400.11.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
			400.11.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.11.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.11.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			400.11.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan

			400.11.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
			400.11.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.11.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.11.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
			400.11.5.1	Kuantitas Penduduk
			400.11.5.2	Kualitas Penduduk
			400.11.5.3	Mobilitas Penduduk
			400.11.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
			400.11.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
		400.11.5	Penyerasian Kependudukan	
			400.11.5.1	Indikator Kependudukan
			400.11.5.2	Proyeksi Penduduk
			400.11.5.3	Perencanaan Kependudukan
			400.11.5.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
			400.11.5.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
	400.13	KELUARGA BERENCANA		
		400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
			400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
		400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
		400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
			400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
		400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
		400.13.7	Pengembangan Sistem	
			400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal

			400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
		400.13.8	Pengembangan Materi	
			400.13.8.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
			400.13.8.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.10	Analisis Sosial	
		400.13.11	Analisis Ekonomi	
		400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
		400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
		400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
		400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
		400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
		400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
		400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
		400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
		400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
			400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

		400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria	
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
		400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
		400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
		400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
		400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak	
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraanbina keluarga dan anak
		400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
		400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja	
			400.13.28.1	Pelebagaiaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
			400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
		400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
		400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
		400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Rentan
			400.13.31.2	Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan
		400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
		400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
		400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
		400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.41	Advokasi dan pencitraan	
		400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
			400.13.42.1	Promosi
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi Produk media komunikasi
		400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
		400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten	
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah

			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah
		400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
		400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
		400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
		400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
		400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
		400.13.51	Analisis dan evaluasi	
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
		400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
		400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
		400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	
			400.13.54.1	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
	400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT		
		400.14.1	Keprotokolan	
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
		400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	

		400.14.3	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media	
		400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster/plakat
			400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan
		400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungna dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Praktek Kerja Lapangan (PKL)
			400.14.5.5	Forum Kehumasan
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
		400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
		400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/ Kota/Kabupaten	
		400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	
		400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	
		400.14.10	Pameran/sayembara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	
		400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	
		400.14.12	Ucapan terima kasih, Ucapan Selamat, BelaSungkawa, Permohonan Maaf	
500	PEREKONOMIAN			
	500.1	KETAHANAN PANGAN		
		500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	
		500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
			500.1.2.2	Akses Pangan Kerawanan
			500.1.2.3	Kerawanan Pangan
		500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan	
			500.1.3.1	Distribusi Pangan
			500.1.3.2	Harga Pangan
			500.1.3.3	Cadangan Pangan
		500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan
			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
		500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan

		500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	
		500.1.7	Bimbingan Teknis	
		500.1.8	Evaluasi	
	500.2	PERDAGANGAN		
		500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri	
			500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
			500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan
			500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
			500.2.2.4	Informasi Perusahaan
			500.2.2.5	Pelaku Pasar
			500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
			500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
			500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribus
			500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
			500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
			500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
			500.2.2.14	Informasi Pasar
			500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
			500.2.2.16	Informasi Hasil Industri
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
		500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			500.2.3.1	Kelembagaan dan imformasi Standar
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
			500.2.3.4	Tata usaha
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			500.2.3.6	konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
			500.2.3.11	Jasa
			500.2.3.12	Kerjasama
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama

			500.2.3.14	Kelembagaan dan Penilaian
			500.2.3.15	Pengawasan
			500.2.3.16	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.17	Balai Pengujian UTTP
		500.2.3	Perdagangan Berjangka Komoditi	
			500.2.3.1	Pengkajian pasar
			500.2.3.2	Pengawasan Transaksi
			500.2.3.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
			500.2.3.4	Pengkajian pasar
			500.2.3.5	Pengembangan Pasar
			500.2.3.6	Sistem informasi
			500.2.3.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
			500.2.3.8	Pengawasan pasar lelang
			500.2.3.9	Pengawasan sistem gudang
		500.2.4	Bimbingan Teknis	
		500.2.5	Evaluasi	
	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		500.2.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.2.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
			500.2.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
			500.2.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
			500.2.2.3	Keanggotaan Koperasi
			500.2.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
		500.2.3	Produksi	
			500.2.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			500.2.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
			500.2.3.3	Perikanan dan Peternakan
			500.2.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
			500.2.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
		500.2.4	Pembiayaan	
			500.2.4.1	Program Pendanaan
			500.2.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan
			500.2.4.3	Urusan Permodalan
			500.2.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
			500.2.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
			500.2.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
		500.2.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
			500.2.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
			500.2.5.2	Ekspor dan Impor
			500.2.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
			500.2.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
			500.2.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis

			500.2.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
		500.2.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			500.2.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
			500.2.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
			500.2.6.3	Peran Serta Masyarakat
			500.2.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
			500.2.6.5	Advokasi
		500.2.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
			500.2.7.1	Produktifitas dan Mutu
			500.2.7.2	Restrukturisasi Usaha
			500.2.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
			500.2.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
			500.2.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
		500.2.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
			500.2.8.1	Penelitian Koperasi
			500.2.8.2	Penelitian UKM
			500.2.8.3	Penelitian Sumber Daya
			500.2.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
		500.2.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
		500.2.10	Pedagang Kaki Lima	
			500.2.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
			500.2.10.2	Sarana dan Prasarana
		500.2.11	Monitoring dan Evaluasi	
	500.4	KEHUTANAN		
		500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.4.2	Penyuluhan	
			500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
			500.4.2.2	Materi Penyuluhan
			500.4.2.3	Program Penyuluhan
			500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
			500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
			500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
			500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
			500.4.2.8	Deseminasi
			500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
		500.4.3	Planologi Kehutanan	
			500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
			500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
			500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
			500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
			500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

			500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
			500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
			500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
			500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
			500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
			500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
			500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
			500.4.3.15	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
		500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
			500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
			500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.3	Kerjasama
			500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
			500.4.4.5	Perpanjangan
			500.4.4.6	Modal dan Peralatan
			500.4.4.7	Investasi Industri
			500.4.4.8	Peralatan
			500.4.4.9	Tenaga Kerja
			500.4.4.10	Pemegang Saham
			500.4.4.11	Neraca Perusahaan
			500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
			500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
			500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
			500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
			500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
			500.4.4.17	Produksi Kayu
			500.4.4.18	Produksi non kayu
			500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.21	Industri Non Kayu
			500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
			500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
			500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi

			500.4.4.25	Pemblokiran
			500.4.4.26	Denda
			500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
			500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
			500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
			500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
			500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
			500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
			500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
			500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
			500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
			500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
			500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil
			500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
			500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
		500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
			500.4.5.1	Standardisasi
			500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
			500.4.5.3	Pengembangan
			500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
			500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.7	Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Huta

			500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
		500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
			500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
			500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
			500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
			500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
			500.4.6.5	Kawasan Konservasi
			500.4.6.6	Pengamanan Hutan
			500.4.6.7	Programdan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
			500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
			500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alat
			500.4.6.11	Bina Cinta Alam
			500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
			500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
		500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
			500.4.7.1	Pengelolaan Benih
			500.4.7.2	Kebun Benih
			500.4.7.3	Tegakan Benih
			500.4.7.4	Pengadaan Benih
			500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
			500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.7	Pembibitan
			500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
			500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
			500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
			500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			500.4.7.14	Perhutanan Sosial
			500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
		500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			500.4.8.1	Penelitian,Pengkajiandan Pengembangan Kehutanan
			500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
			500.4.8.3	Diseminasi

			500.4.8.4	Gelar Teknologi
			500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.5.2	Perikanan Tangkap	
			500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
			500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
			500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
			500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
			500.5.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
			500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
			500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
			500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Kelembgaan
			500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
			500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
			500.5.2.14	Kenelayan
			500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
			500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.3	Perikanan Budidaya	
			500.5.3 .1	Potensi Lahan dan Air
			500.5.3 .2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
			500.5.3 .3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
			500.5.3 .4	Perbenihan Skala Kecil
			500.5.3 .5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
			500.5.3 .6	Budidaya Air Tawar
			500.5.3 .7	Budidaya Ikan Hias
			500.5.3 .8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
			500.5.3 .9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
			500.5.3 .10	Hama dan Penyakit Ikan
			500.5.3 .11	Perlindungan Lingkungan Budi daya
			500.5.3 .12	Investasi dan Permodalan Usaha

			500.5.3 .13	Kewirausahaan Budidaya
			500.5.3 .14	Pelayanan Usaha Budidaya
			500.5.3 .15	Kelembagaan dan Ketenaga kerjaan
			500.5.3 .16	Promosi Usaha dan Budaya
		500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
			500.5.4.2	Pengembangan Produk
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			500.5.4.4	Industri Pengolahan
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
			500.5.4.8	Pengembangan Industri
			500.5.4.9	Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
			500.5.4.18	Pengembangan Impor
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi
		500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
			500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
			500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
			500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
			500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
			500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi

			500.5.5.6	Konservasi Wawasan
			500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
			500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
			500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
			500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
			500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
			500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
			500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.17	Akses Permodalan
			500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
			500.5.5.20	Pengembangan Usaha
		500.5.6	Pengawasan Perikanan	Sumber Daya Kelautan Dan
			500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
			500.5.6.3	Pengawasan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
			500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
			500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
			500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
			500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
			500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
			500.5.6.17	Penyidikan

			500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
			500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
			500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
		500.5.7	Karantina Ikan	
			500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
			500.5.7.2	Penahanan
			500.5.7.3	Pengasingan
			500.5.7.4	Pengamatan
			500.5.7.5	Pengakuan
			500.5.7.6	Penolakan
			500.5.7.7	Pemusnahan
			500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
			500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
			500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
			500.5.7.11	Pemasukan Formulir
			500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
			500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
			500.5.7.14	Surat Perintah
			500.5.7.15	Rekomendasi
			500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
			500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
			500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
			500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
			500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
			500.5.7.21	Lokasi Karantina
	500.6	PERTANIAN		
		500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh	
		500.6.2	Perlindungan hortikultura	
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
		500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
			500.6.3.1	Penilaian Varietas
			500.6.3.1	Pengawasan Mutu Benih
			500.6.3.1	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
		500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
			500.6.4.1	Basis Data Lahan
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan

			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
		500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
			500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.6.5.5	Kelembagaan
		500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
			500.6.6.1	Pembiayaan Program
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
		500.6.7	Pupuk Pestisida	
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik
			500.6.7.3	Pestisida
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih
		500.6.10	Budidaya Serealia	
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.6.10.3	Jagung
			500.6.10.4	Serealia Lain
		500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
			500.6.11.1	Kedelai
			500.6.11.2	Ubi Kayu
			500.6.11.3	Aneka Kacang
			500.6.11.4	Aneka Umbi
		500.6.12	Tanaman Pangan	

			500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Penggangu Tumbuhan
			500.6.12.2	Pengeloalan Data Organisasi Penggangu Tumbuhan
			500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
		500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
			500.6.13.1	Padi
			500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.6.13.4	Aneka Umbi
		500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
			500.6.14.1	Tanaman Pangan
			500.6.14.2	Holtikultura
			500.6.14.3	Perkebunan
			500.6.14.4	Peternakan
		500.6.15	Mutu dan Standardisasi	
			500.6.15.1	Standardisasi
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
		500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
			500.6.16.2	Investasi
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
		500.6.17	Pemasaran Domestik	
			500.6.17.1	Informasi Pasar
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
		500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
		500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
		500.6.20	Diseminasi	
		500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian	
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya

		500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
		500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
		500.6.25	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	
		500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
			500.6.26.1	Hak Cipta
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa
			500.6.26.4	Hak Merek
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
		500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham Perkebunan
			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak
		500.6.28	Pelayanan Hukum	
			500.6.28.1	Sertifikasi
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
		500.6.29	Karantina Pertanian	
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
			500.6.29.2	Karantina Hewan
		500.6.30	Bimbingan Tehnis	
		500.6.31	Evaluasi	
	500.7	PETERNAKAN		
		500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
			500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
			500.7.2.2	Pakan Ternak
			500.7.2.3	Budidaya Ternak
			500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber

				Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
			500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
		500.7.2	Bimbingan Teknis	
		500.7.2	Evaluasi	
	500.8	PERKEBUNAN		
		500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.8.2	Tanaman Semusim	
			500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
			500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
			500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman
			500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.9	PERINDUSTRIAN		
		500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
			500.9.2.1	Industri Manufaktur
			500.9.2.2	Industri Agro
			500.9.2.3	Teknologi Tinggi
			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.3	Promosi Industri	
			500.9.3.1	Industri Manufaktur
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
			500.9.4.1	Industri Manufaktur
			500.9.4.2	Industri Agro
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
			500.9.5.1	Industri Manufaktur
			500.9.5.2	Industri Agro
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.6	Industri Hijau	
			500.9.6.1	Industri Manufaktur
			500.9.6.2	Industri Agro

			500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
		500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
		500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
		500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
		500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
		500.9.12	Standarisasi	
			500.9.12.1	Standar
			500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
			500.9.12.3	Infrastruktur Standar
		500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
			500.9.13.1	Kebijakan Industri
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
		500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
			500.9.14.1	Industri Hijau
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup
			500.9.14.3	Energi
		500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
			500.10.1.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
			500.10.1.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.1.3	Pertambangan
			500.10.1.4	Panas Bumi
			500.10.1.5	Geosains
			500.10.1.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM
			500.10.1.7	Kelayakan Lingkungan
		500.10.3	Penelitian Kegeologian	
			500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
			500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
			500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian

			500.10.3.4	Log-book peralatan survei/ peralatan uji/kalibrasi
			500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
			500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
			500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.3.9	Survei Geologi
		500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
			500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
			500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.4.3	Geologi Tata Lingkungan
			500.10.4.4	Survei Geologi
			500.10.4.5	Konservasi
		500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
			500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
			500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
			500.10.5.4	Survei Geologi
		500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
			500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
			500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
			500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
			500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
			500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
			500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
			500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana ImporBarang (RIB)
		500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional

			500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
			500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
			500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
			500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
			500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
			500.10.7.7	Partisipasi Interest
			500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
		500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, an, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/remendasi/penandasahan), Pengawasan
			500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
			500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

		500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
			500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
			500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
			500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR
			500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
			500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
			500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
			500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
			500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
			500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan,Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan
			500.10.9.10	Usaha penunjang
		500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

			500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi
		500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
			500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
			500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
			500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
			500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
			500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
			500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
		500.10.12	Panas Bumi	
			500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
			500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan
			500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
			500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
			500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
			500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
			500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification
			500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi
			500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
			500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
			500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
			500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
			500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
			500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
			500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
			500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi

			500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi
		500.10.13	Bioenergi	
			500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
			500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
			500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
			500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
			500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
			500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
			500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
			500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
			500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.14	Aneka Energi	
			500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
			500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
			500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
			500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
			500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.15	Konservasi Energi	
			500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
			500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
			500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
			500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
			500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/ teknologi efisiensi
			500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
			500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
			500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
			500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
			500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
		500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
			500.10.16.1	Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

			500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak jadan Gas Bumi
			500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
			500.10.16.4	Evaluasi Program Ker
		500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
			500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
			500.10.17.2	Pengembangan Listrik pedesaan, Antara lain: Data proram listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
			500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenaga listrikan
		500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
			500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenaga listrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenaga listrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
			500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
			500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
			500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
		500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
			500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
			500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
			500.10.19.3	Usaha penunjang ketenaga listrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga

				Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
			500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan,Dokumen perhitungan faktoremisi, Clean Development Mechansim (CDM)
		500.10.20	Sertifikasi	
			500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
			500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
			500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
			500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
			500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
		500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
			500.10.21.1	Standarisasi Kompetensi
			500.10.21.2	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
		500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
		500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
			500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.3	3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
			500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
			500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
			500.10.24.5	Laporan hasil
		500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
			500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan
			500.10.25.2	Program Mineral dan Batubara

			500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
			500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
			500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
			500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
			500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
			500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
			500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara
		500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
			500.10.26.1	Ketenagakerjaan
			500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tamba
			500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
			500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang
			500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
			500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
			500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
			500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral

			500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
		500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
			500.10.27.1	Ketenagakerjaan
			500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
			500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
			500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
			500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.9	Pengelolaan BarangPerjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
			500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
			500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
			500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)
		500.10.28	Penerimaan Negara	
			500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak

			500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian (PNBP)
		500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
			500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
			500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
			500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang
			500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
			500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
			500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL
			500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
			500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara Lain Laporan Pelaksanaan rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
			500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
			500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan

			500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
			500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
			500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
			500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
			500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
			500.10.29.17	Pengawasan Teknis
			500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
			500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
		500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
			500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
			500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
			500.10.30.3	Dokumen penerapan/ pemanfaatan/pendayagunaan/ replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/ pengembangan/inovasi
			500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian pengembangan dan inovasi
			500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.6	Pembinaan penelitian/ Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.8	Data dan informasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.9	Master proceeding /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
			500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK

			500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
		500.10.31	Sarana Litbang	
			500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
			500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/ Peralatan Uji Kalibrasi
		500.10.32	Afiliasi	
			500.10.32.1	Proyek Percontohan
			500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
			500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
			500.10.32.4	Penyajian Informasi
		500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
			500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
			500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
			500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
			500.10.33.4	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
		500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
			500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
			500.10.34.3	Laboratorium
			500.10.34.4	Study
			500.10.34.5	Teknologi Proses
			500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
			500.10.34.7	Teknologi Gas
		500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
			500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
			500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
			500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
		500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
			500.10.36.1	Energi baru terbarukan
			500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
			500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
			500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
	500.11	PERHUBUNGAN		
		500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	

			500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
			500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
			500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
			500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
			500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
			500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
			500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
			500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
			500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
		500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
			500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
		500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
			500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
			500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
			500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
			500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan
		500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
			500.11.5.1	Sistem Informasi dan rekayasa kendaraan bermotor
			500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
			500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
			500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
		500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
			500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lallintas di jalan nasional
		500.11.7	Perlengkapan Jalan	
			500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
			500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
			500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
			500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

			500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
		500.11.8	Angkutan penumpang	
			500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas
			500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
			500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
			500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
			500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
			500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
			500.11.8.7	Angkutan perintis
			500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
		500.11.9	Angkutan Barang	
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
		500.11.10	Monitoring Operasional	
			500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
			500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
		500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
			500.11.11.1	Pedoman Teknis
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.11.11.3	Bimtek PPNS
			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai,danau,dan penyeberangan

			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
		500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi	
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
		500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
			500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
		500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi Pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
			500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
			500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
		500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
			500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau

			500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
			500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
			500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
			500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
			500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
			500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
			500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
		500.11.24	Angkutan Perkotaan	
			500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
			500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
			500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
			500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
			500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
			500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek

				yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
			500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
			500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
			500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
			500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
			500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
		500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
			500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
			500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
			500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
			500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
		500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
			500.11.29.1	Penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
			500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
			500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
		500.11.31	Audit Keselamatan	
			500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
			500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku

				transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
			500.11.32.1	Pedoman keselamatan
			500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.11.33	Parkir	
			500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
			500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
			500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
	500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
		500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.12.2	Telekomunikasi	
			500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
			500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
			500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
			500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
		500.12.3	Penyiaran	
			500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
			500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
			500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
			500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
			500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
			500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
			500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
		500.12.5	Pengendalian Informatika	
			500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
			500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiba
		500.12.6	e- Government	
			500.12.6.1	Tata Kelola e-Government

			500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
		500.12.7	e- Business	
			500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
		500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
			500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
			500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
		500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
			500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
			500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
			500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
			500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
		500.12.10	Keamanan Informasi	
			500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
			500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
			500.12.10.3	Teknologi Keamanan Informasi
			500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
			500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
		500.12.11	Komunikasi Publik	
			500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
			500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
			500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
		500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
			500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
			500.12.12.2	Informasi Perekonomian
			500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
		500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
			500.12.13.1	Media Cetak
			500.12.13.2	Media Online
			500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
		500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
		500.12.15	Infrastruktur Informatika	
			500.12.15.1	Jaringan

			500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
			500.12.15.3	Keamanan Informatika
		500.12.16	Sistem dan Data	
			500.12.16.1	Portal dan Konten
			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
		500.12.17	Pusat Kerjasama	
			500.12.17.1	Kerja Sama daerah
			500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
		500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis
		500.12.19	Evaluasi	
	500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
			500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
			500.13.2.3	Industri Pariwisata
			500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
			500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
		500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
			500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
			500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
			500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
		500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
			500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
			500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
			500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
		500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	
			500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
			500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
		500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
			500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

			500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataa an dan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataa n dan Ekonomi Kreatif
	500.14	STATISTIK		
		500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
			500.14.2.1	Perencanaan
			500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
			500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
			500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman,pengelo mpokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
		500.14.3	Survei	
			500.14.3.1	Perencanaan
			500.14.3.2	Persiapan
			500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel,Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas

			500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
			500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
		500.14.4	Konsolidasil Data Statistik	
			500.14.4.1	Kompilasi Data
			500.14.4.2	Analisis data
			500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
		500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
	500.15	KETENAGAN KERJAAN		
		500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
			500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
			500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
		500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
			500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
			500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
			500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
			500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
		500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
			500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
			500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
			500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
			500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
			500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
			500.15.5.3	Tenaga Pelatihan

			500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
		500.15.6	Bina Pemagangan	
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
		500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
			500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
			500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
		500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.15.8.3	Bursa Kerja
			500.15.8.4	Analisis Jabatan
		500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
			500.15.9.1	Antar Kerja
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.15.9.3	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
		500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
			500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.15.11	Standardisasi Profesi	
			500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
		500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
			500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.15.12.2	Perjanjian Kerja
			500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
		500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
			500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
		500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
			500.15.14.1	Pengupahan

			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
		500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
		500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
			500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
		500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
			500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
		500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
		500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
			500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
		500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
			500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi

			500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
			500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
		500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
			500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan KompetensiK3
			500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.16	PENANAMAN MODAL		
		500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal	
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
		500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			500.16.2.1	Deregulasi Penanaman Modal
			500.16.2.2	Pengembangan Potensi Daerah
			500.16.2.3	Pemberdayaan Usaha
			500.16.2.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
			500.16.2.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
			500.16.2.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
		500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
			500.16.4.4	Promosi Sektoral
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
		500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
			500.16.5.2	Kerja Sama Regional

			500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
		500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
			500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
			500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
			500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
			500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
		500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
			500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
			500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
			500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
			500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
	500.17	PERTANAHAN		
		500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
			500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.17.2.1	Pengurusan Legalitas Tanah
			500.17.2.1	Dokumentasi Pertanahan
			500.17.2.1	Advokasi Pertanahan
		500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
			500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
			500.17.3.1	Data dan Pemetaan Tematik
			500.17.3.1	Penguatan Atas Tanah
		500.17.4	Sengketa Tanah	
			500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
			500.17.4.1	Advokasi dan Pengendalian
	500.18	TRANSMIGRASI		
		500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
			500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
			500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
			500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
		500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
			500.18.3.1	Penyiapan Lahan
			500.18.3.2	Penyiapan Sarana
			500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
			500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
		500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
			500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
			500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
			500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan

			500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
		500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
			500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
			500.18.5.2	Kerjasama
			500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
			500.18.5.4	Pelayanan Investasi
		500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
			500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
			500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
			500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
			500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
			500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
		500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
			500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
			500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
			500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
			500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
		500.18.8	Pengembangan Usaha	
			500.18.8.1	Kewirausahaan
			500.18.8.2	Produksi
			500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
			500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
		500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
			500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
			500.18.9.2	Pengembangan Sarana
			500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
			500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
		500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
			500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
			500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
			500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
			500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
	600.1	PEKERJAAN UMUM		
		600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
			600.1.2.2	Kelembagaan

			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
		600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
			600.1.3.2	Manajemen Mutu
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
		600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
		600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan
			600.1.5.5	Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
			600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
			600.1.7.1	Pengembangan Jaringan Jalan
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		600.1.8	Pembangunan Jalan	
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
		600.1.9	Preservasi Jalan	

			600.1.9.1	Standar dan Pedoman
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
			600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
		600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis
			600.1.10.3	Teknik Jembatan
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
		600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
		600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
			600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
		600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
		600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
			600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
			600.1.14.5	Kelembagaan
		600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
			600.1.15.5	Kelembagaan
		600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
			600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
			600.1.16.5	Kelembagaan
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
			600.1.17.5	Kelembagaan
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
	600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
		600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
			600.2.2.3	Kemitraan
		600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
		600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
		600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.5.2	Analisa Teknik
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
		600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik
			600.2.6.2	Penyediaan
			600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
			600.2.6.4	Pengelolaan
		600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah

			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
		600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
			600.2.8.1	Perencanaan Teknik
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
			600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
			600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
		600.2.9	Investasi Infrastruktur	
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
			600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
		600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
			600.2.10.4	Manajemen Mutu
		600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
			600.2.11.1	Kelembagaan
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
		600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
		600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
			600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
			600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
		600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
			600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
			600.2.15.2	Pengembangan Materi

			600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
			600.2.16.1	Antar Sektor
			600.2.16.2	Antar Wilayah
		600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis
		600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
			600.2.18.1	Pengembangan Infrastuktur Kawasan Metropolitan
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastuktur Kawasan kota Besar dan Kota Baru
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastuktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
			600.2.18.4	Analisis Manfaat dan Skema Pembiayaan
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
		600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	
	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)		
		600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
		600.3.2	Perencanaan	
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
			600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
		600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
			600.3.3	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
			600.3.3	Ijin Pemanfaatan Ruang
			600.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.4	Pemetaan	
			600.3.4.1	Peta Dasar
			600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
			600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
			600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara

	600.4	LINGKUNGAN HIDUP		
		600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
		600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
		600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
		600.4.5	Dampak Lingkungan	
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
		600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
			600.4.8.1	Pengembangan
			600.4.8.2	Pemanfaatan
			600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
			600.4.8.4	Keamanan Hayati
			600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
		600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
			600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
			600.4.9.2	Rawa
		600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
			600.4.10.1	Perangkat mitigasi
			600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
			600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
			600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
		600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	

			600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
			600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
		600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
			600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
			600.4.12.2	Registrasi dan Notifikasi Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
			600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
		600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
			600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
			600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
			600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
			600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
		600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
			600.4.14.1	Pemantauan
			600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
		600.4.15	Pengelolaan Sampah	
			600.4.15.1	Pembatasan sampah
			600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
			600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
			600.4.15.4	Pembatasan sampah
		600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
			600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
			600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
		600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
			600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
			600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
		600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
			600.4.17.1	Penyidikan
			600.4.17.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
			600.4.17.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
		600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
			600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
			600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
		600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
			600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan

			600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
		600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
			600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
			600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
		600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
			600.4.22.1	Organisasi Profesi Dunia Usaha
			600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
		600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
			600.4.23.1	Pengelolaan Data
			600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
			600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
			600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
		600.4.24	Masyarakat Perkotaan	
			600.4.2.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
			600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
		600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
			600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
			600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
			600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
		600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
			600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
			600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN			
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
		700.1.1	Rencana Pengawasan	
			700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
			700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
			700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
			700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
			700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
		700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
			700.2.1.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN			
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA		
		800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Jabatan, Klasifikasi Jabatan	
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
		800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
			800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN
			800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN

			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
		800.1.3	Mutasi Pegawai	
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN
			800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
		800.1.4	Pengembangan Karir	
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai Swasta
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
			800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
		800.1.5	Kinerja Aparur Sipil Negara	
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
		800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
			800.1.6.2	Disiplin
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
			800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis

				Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
		800.1.7	Bantuan Hukum	
		800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
			800.1.8.1	Status Kepegawaian
			800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
			800.1.8.3	Keberatan Pegawai
			800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
		800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
		800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
		800.1.11	Administrasi Pegawai	
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
			800.1.11.2	Cuti Sakit
			800.1.11.3	Cuti Bersalin
			800.1.11.4	Cuti Tahunan
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
			800.1.11.6	Cuti Besar
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (LP2P)
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, MUtasi Gaji / tunjangan
		800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan
			800.1.12.4	Bantuan Sosial
			800.1.12.5	Pakaian Dinas
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
		800.1.13	Administrasi Perseorangan	
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		800.1.14	Penilaian Kompetensi	
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
		800.2.3	Widyaiswara	
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
		800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	

			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN			
	900.1	KEUANGAN DAERAH		
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2	Penyusunan Anggaran	
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Koa
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD
		900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji

			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
			900.1.3.10	Laporan Keuangan
		900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report/Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
			900.1.4.14	Ketentuan/ Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
		900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Nerac Bulanan /Triwulanan /Semesteran

		900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan, Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
		900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
		900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	

		900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
		900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
		900.1.12	Anggaran Daerah	
			900.1.12.1	Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
		900.1.13	Pendapatan Dan Investasi Daerah	
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah

				lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
		900.1.14	Fasilitas Dana Perimbangan	
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan

				monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
		900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung

				jawaban keuangan daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah
			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
I.	UMUM				
	A.	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
		1. Telekomunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
		a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
		a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		4. Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		5. Rapat Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		6. Penyediaan Konsumsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		7. Pengurusan Kendaraan Dinas			
		a. Pengurusan Surat-Surat kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pemeliharaan dan Perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		8. Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor			
		a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Penghijauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Perbaikan Gedung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

			d. Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			f. Kebersihan Gedung dan Taman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		9.	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
			a. Perbaikan/ Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b. Pemasangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		10.	Ketertiban dan Keamanan			
			a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		11.	Administrasi Pengelolaan Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		12.	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	B.	PERLENGKAPAN				
		1.	Inventarisasi dan Penyimpanan			
			a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
			b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2.	Pemeliharaan Peralatan Kantor			
			a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
			b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Distribusi			
			a. Barang Habis Pakai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Barang Milik Daerah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah

		4.	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung jawabkan	7 Tahun	Musnah
		5.	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C.	PENGADAAN				
		1.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2.	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Database Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Database Kontrak, Database Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Permanen
		6.	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	D.	PERPUSTAKAAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Deposit Bahan Pustaka a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
		3.	Koleksi Pustaka a. Pembelian b. Hibah c. Hadiah d. Tukar Menukar e. Implementasi Undang-Undang KCKR f. Terbitan Internal	3 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	7 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
			g. Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			h. Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		6.	Layanan Perpustakaan a. Keanggotaan b. Peminjaman c. Pengembangan Gemar Baca	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		7.	Kerja Sama Perpustakaan a. MoU	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen

			b. Perjanjian Kerja Sama	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
			c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		8.	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
			a. Pengembangan Situs Web	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	1 Tahun	Musnah
			b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	1 Tahun	Musnah
			c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	3 Tahun	Permanen
			d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		9.	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		10.	Konservasi			
			a. Perawatan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		12.	Transformasi Digital	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13.	Kurasi Digital	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		14.	Pengembangan Perpustakaan			
		a.	Perpustakaan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Perpustakaan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Perpustakaan Sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		E	KEARSIPAN			
		1.	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pembinaan Kearsipan			
		a.	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		b.	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c.	Penilaian Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d.	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e.	Database Arsiparis	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		f.	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g.	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		h.	Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		i.	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

			j.	Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA dan Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		3.	Pengelolaan Arsip Dinamis				
			a.	Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/ Buku Ekspedisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			e.	Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		4.	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen	

		5.	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen
		6.	Penyusutan Arsip			
		a.	Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan dan Daftar Arsip yang Dipindahkan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b.	Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusanahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		c.	Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

			Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan			
		7.	Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		8.	Database Pengelolaan Arsip Dinamis			
		a.	Database Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	1 Tahun	Permanen
		b.	Database Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	1 Tahun	Permanen
		9.	Pengelolaan Arsip Statis			
		a.	Akuisisi, Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		b.	Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		c.	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI), dan Transkrip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		d.	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		e.	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, Guide	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

			f. Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g. Preservasi Kuratif	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			h. Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i. Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		12.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		14.	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Pengawasan Kearsipan			
		a.	Pengawasan Kearsipan Internal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Pengawasan Kearsipan Eksternal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Sanksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	F.	PERSANDIAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengamanan Persandian			
		a.	Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		3.	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
		a.	Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Administrasi Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
		a.	Sumber Daya Manusia (SDM)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Jaring Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Layanan Sertifikasi Elektronik			
		a.	Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b.	Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		f.	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g.	Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	G	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
		1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang			
		a.	Musrenbang Provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b.	Musrenbang Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c.	Musrenbang Kab/Kota	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d.	Musrenbang Kecamatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		e.	Musrenbang Kelurahan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		f.	Musrenbang Desa	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		2.	Perencanaan Pembangunan Daerah			
		a.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Rencana Anggaran Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Rencana Pembangunan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f. Program Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g. Penetapan/Kontrak Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h. Laporan Berkala	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			i. Laporan Insidental	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			j. Evaluasi Program	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		6.	Aksi Strategis Daerah			
			a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d. Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e. Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		7.	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
			a. Pendanaan Nasional dan Hibah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b. Pendanaan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c. Kerja Sama Pembangunan Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d. Surat Berharga Syariah Negara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	H	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
		1.	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			a. Pembentukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Pengubahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Pembubaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2.	Uraian Jabatan dan Tata Kerja			
			a. Analisis Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Analisis Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		3.	Ketatalaksanaan a. Proses Bisnis b. Standar Pelayanan c. Standar Operasional Prosedur d. Pelayanan Publik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
		4.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Evaluasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi a. Budaya Kerja b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		I.	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
		1.	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Data b. Statistik c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		7.	Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		8.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		9.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		10.	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
II.	PEMERINTAHAN					
	A.	OTONOMI DAERAH				
		1.	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a.	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e.	Assosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
		a.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	B.	PEMERINTAHAN UMUM				
		1.	Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Dekonsentrasi dan Kerja Sama			
			a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Fasilitasi Kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Fasilitasi Pelayanan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
			a. Toponimi dan Data Wilayah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b. Pengembangan dan Penataan Batas Antarnegara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c. Batas Antar Daerah Wilayah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d. Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan, dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e. Pemeliharaan Batas Wilayah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	C	HUKUM				
		1.	Program Legislasi			
			a. Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Program Legislasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		2.	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan	2 Tahun Setelah Diundangkan	3 Tahun	Permanen
		3.	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
		a.	Keputusan/Ketetapan Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Keputusan/Ketetapan Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Keputusan/Ketetapan Walikota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e.	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f.	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Instruksi/Surat Edaran			
		a.	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Instruksi/Surat Edaran Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Surat Perintah			
		a.	Surat Perintah Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Surat Perintah Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Surat Perintah Walikota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama			
		a.	Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak	3 Tahun	Permanen

				telah Dilaksanakan		
			b. Luar Negeri	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		8.	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Referensi	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Permanen
		9.	Sosialisasi/Penyuluhan/Pe mbinaan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		10.	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun Setelah Diperoleh Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
		11.	Kasus/Sengketa Hukum a. Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
			b. Perdata Kasus/Sengketa Perdata	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
			c. Tata Usaha Negara	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
			d. Perburuhan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah

			e. Arbitrase	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
			f. Sengketa Adat	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Permanen
		12.	Perizinan	2 Tahun Setelah Izin Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		13.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
			a. Hak Cipta	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
			b. Hak Paten	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
			c. Hak Desain Industri	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
			d. Hak Rahasia Dagang	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
			e. Hak Merek	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
			f. Permohonan HaKI yang Ditolak	1 Tahun Setelah Ditolak Permohonan	3 Tahun	Musnah
III	POLITIK					
	A.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		1.	Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
			a. Ketahanan Ideologi Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Wawasan Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Bela Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		3.	Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
			a. Ketahanan Seni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Ketahanan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Agama dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Organisasi Kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Masalah Sosial Kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f. Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h. Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			i. Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			j. Fasilitasi Sengketa Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			k. Fasilitasi Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Politik Dalam Negeri			
			a. Implementasi Kebijakan Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			yang Memperoleh Kursi			
			e. Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f. Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g. Database Parpol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i. Pemilihan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Ketahanan Ekonomi			
		a.	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Perilaku Perekonomian Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
IV.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
	A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
		1.	Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja			
		a.	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Perlindungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	B.	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			
		a.	Rencana dan Standardisasi dan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			Pengawakan dan Perbekalan			
			b. Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah (Kecuali Laporan)
			f. Registrasi BEACON	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan			
		a.	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		8.	Operasi Komunikasi			
		a.	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Registrasi BEACON	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		10.	Pengembangan Sistem Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Penyajian dan Layanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		12.	Pelapooran dan Evaluasi			
			a. Laporan Harian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Laporan Bulanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Laporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
V.	KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	A	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum			
			a. Data Gender	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			b. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)			
			a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Data Perlindungan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
			e. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			f. Analisis dan Penyajian Informasi Gender	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)			
			a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah

			b. Data Perlindungan Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			c. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			
			a. Pemenuhan Hak Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			b. Data Klaster Hak Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			c. Data Tumbuh Kembang Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			d. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f. Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		8.	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	B.	PENDIDIKAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
			a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pelatihan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Peringatan Hari Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. <i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		3.	Pendidikan Masyarakat a. Penyelenggaraan Program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial c. Pembinaan Program d. Lomba/Pemberian Penghargaan e. Pameran f. Rapat Koordinasi g. Sosialisasi h. Sertifikasi dan Akreditasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
		4.	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama a. Kurikulum, Bahan Ajar b. <i>Block Grant</i> c. Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi d. Lomba, Penghargaan, Penganugerahan e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
			f. Bantuan Siswa Miskin	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Pendidikan Khusus/Layanan Khusus			
			a. Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran b. <i>Block Grant</i> c. Lomba dan Festival	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
			d. Sosialisasi dan Bimtek e. Pendataan f. Kelembagaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		7.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik a. Pendataan dan Pemetaan b. Uji Kompetensi Guru c. Sertifikasi Guru d. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan Kesejahteraan Guru f. Sosialisasi dan Bimtek g. <i>Block Grant</i>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen
		8.	Sekolah Menengah Atas a. Kurikulum b. Bahan Ajar c. Pelatihan d. <i>Block Grant</i>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen

			e.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Lomba, Sayembara, Festival	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h.	Bantuan Siswa Miskin	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		9.	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
			a.	Bahan Ajar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Petunjuk Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	<i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Sosialisasi, Bimtek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Kurikulum/Bahan Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Alat Bantu Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Pendataan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Pendidik dan Tenaga Pendidik				
			a.	Pendataan dan Pemetaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Uji Kompetensi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Sertifikasi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	<i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Penilaian Pendidikan				
			a.	Penilaian Akademik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penilaian Non Akademik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		12.	Data dan Statistik Pendidikan				
			a.	Data Peserta Sidik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		13.	Prasarana dan Sarana Pendidikan			
			a. Prasarana Pendidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b. Sarana Pendidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c. Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	C	KEOLAHRAGAAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
			a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b. Olahraga Pendidikan Tinggi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		3.	Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
			a. Olahraga Massal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b. Olahraga Tradisional	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c. Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
			a. Olahraga Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b. Olahraga Rekreasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c. Olahraga Prestasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d. Sekolah Khusus Olahraga	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
			a. Olahraga Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Layanan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
			a. Kemitraan Keolahragaan	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
			b. Penghargaan Olahraga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban	3 Tahun	Permanen

				Para Pihak Telah Ditunaikan		
		7.	Pembibitan dan IPTEK Olahraga a. Pembibitan Olahraga b. Kompetisi c. IPTEK Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		8.	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Tenaga Keolahragaan b. Organisasi Keolahragaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
		9.	Industri dan Promosi Olahraga a. Industri Olahraga b. Promosi Olahraga	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		10.	Olahraga Prestasi a. Daerah b. Nasional c. Internasional	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		11.	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga a. Standardisasi Keolahragaan b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan c. Infrastruktur Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		D	KEPEMUDAAN			
		1.	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan) c. Pengembangan	2 Tahun 2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		3.	Peningkatan Wawasan Pemuda a. Wawasan Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Wawasan Lingkungan c. Wawasan Sosial dan Hukum	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		4.	Peningkatan Kapasitas Pemuda a. Kapasitas Iman dan Takwa b. Kapasitas IPTEK c. Pemanfaatan IPTEK	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

		5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)			
			a. Pengkajian b. Pengembangan c. Pendayagunaan (Fasilitasi)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		6.	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda a. Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Kewirausahaan a. Kelembagaan b. Pengaderan c. Perintisan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		8.	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
			d. Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda a. Standardisasi b. Infrastruktur Pemuda	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		10.	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemitraan b. Penghargaan Pemuda	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	E.	KEBUDAYAAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen

		2.	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
			a. Registrasi Nasional	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
			b. Pelindungan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
			c. Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
			d. Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
		3.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
			a. Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			b. Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			c. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			d. Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		4.	Sejarah dan Nilai Budaya			
			a. Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Pemetaan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f. Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
			a. Internalisasi Nilai Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Kekayaan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Diplomasi Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	F	KESEHATAN				
		1.	Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Upaya Kesehatan Dasar			
			a. Pelayanan Kedokteran Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			e.	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	ICD 10, <i>Destistry</i> , dan <i>Stomatology</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Pembiayaan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			m.	Akreditasi Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			n.	Puskesmas Berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.		Upaya Kesehatan Rujukan			
			a.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi, dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Badan Pengawas Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			j.	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		4.	Keperawatan dan Keteknisian Medik			
			a. Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Bina Pelayanan Kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan			
			a. Mikrobiologi dan Imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Patologi dan Toksilogi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Perizinan dan Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Prasarana dan Sarana Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Kesehatan Jiwa			
			a. Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Etikolegal dan Asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra			
			a. Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Kesehatan Matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		8.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung a. Pengendalian Tuberkolosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Pengendalian Kusta dan Frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang a. Pengendalian Malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pengendalian Arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pengendalian Zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Penyakit Kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Penyakit Kronis dan Generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Penyehatan Lingkungan a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pemukiman dan Tempat Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Kawasan dan Sanitasi Darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Higien Sanitasi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		12.	Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13	Gizi a. Gizi Makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Gizi Mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			c. Gizi Klinik dan Dietetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Kewaspadaan Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		14.	Kesehatan Ibu			
			a. Kesehatan Ibu Hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Pelindungan Kesehatan Reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Kesehatan Anak			
			a. Kelangsungan Hidup Bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Perlindungan Kesehatan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer			
			a. Kesehatan Tradisional Keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kesehatan Tradisional Ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Kesehatan Alternatif dan Komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Penapisan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.	Kesehatan Kerja dan Olahraga			
			a. Pelayanan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kapasitas Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Lingkungan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Kemitraan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Kesehatan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f. Kesehatan Olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		18.	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
			a. Harga Obat Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pengadaan Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Perbekalan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		19.	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan			

			a. b.	Alat Kesehatan Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
			c.	Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		20.	a. b. c.	Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian Farmasi Klinis Farmasi Komunitas	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
			d.	Penggunaan Obat Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		21.	a. b. c.	Produksi dan Distribusi Kefarmasian Obat Tradisional Kosmetik dan Makanan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
			d.	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		22.	a. b.	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan Surat Keterangan Sertifikasi dan Perizinan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
		23.	a. b. c. d. e.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Pemulihan Pemantauan dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
		24.	a. b.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan Tersedianya Data NHA Setiap Tahun Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

		25.	Intelegensia Kesehatan a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		26.	Kesehatan Haji a. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		27.	Promosi Kesehatan				
			a. Sarana Promosi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Hari Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		28.	Data dan Informasi a. Statistik Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Analisis dan Diseminasi Informasi		2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
			c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
		29.	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
			a.	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
			b.	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		30.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
			a.	Penilaian Keamanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Standardisasi Produk Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			c.	Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		31.	Rekam Medis		2 Tahun Disesuaikan dengan Peraturan Kementerian/ Lembaga Terkait	3 Tahun	Permanen
	G	SOSIAL					
		1.	Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Kesejahteraan Sosial Anak				
			a.	Kesejahteraan Sosial Anak Balita	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Rehabilitasi Sosial				
			a.	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kelembagaan dan Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
			a.	Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Tuna Susila dan Korban <i>Trafficking</i> Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	

			c.	Warga Binaan Lembaga Masyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA				
		6.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia				
			a.	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial		3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		8.	Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		9.	Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
			a.	Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Kekeragaman Sosial, Penguatan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		10.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
			a.	Kesiapsiagaan dan Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		11.	Jaminan Sosial				

			a.	Seleksi dan Verifikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			c.	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			d.	Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		12.	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial				
			a.	Ketahanan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kemitraan Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil				
			a.	Persiapan Pemberdayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penggalian dan Pengembangan Potensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		14.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
			a.	Identifikasi dan Analisis	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Kapasitas	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			c.	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			d.	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			e.	Bantuan Langsung	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			f.	Kerja Sama Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

		15.	Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				
			a.	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	H	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
		1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
			a.	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e.	Pengembangan Kapasitas Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
			a.	Lembaga Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pembangunan Partisipatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pendataan Potensi Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pelatihan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
			a.	Budaya Nusantara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Tenaga Kerja Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Usaha Ekonomi Masyarakat				

			a.	Usaha Pertanian dan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Produksi dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
			a.	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	I.	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pertamanan				
			a.	Perencanaan Pertamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Taman Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Tata Hias dan Ornamen Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pemakaman				
			a.	Perencanaan Pemakaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pemakaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pelayanan Pemakaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Jalur Hijau				
			a.	Perencanaan Jalur Hijau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Jalur Hijau Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		5.	Peran Serta Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Pengawasan dan Penindakan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Pengelolaan Data		2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
		8.	Evaluasi dan Pelaporan		2 Tahun Setelah Diperbaharui	'3 Tahun	Musnah
	J.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
		1.	Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pendaftaran Penduduk				
			a.	Identitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pindah Datang Penduduk Antarnegara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pendataan Penduduk Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pencatatan Sipil				
			a.	Kelahiran dan Kematian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perkawinan dan Perceraian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pencatatan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			a.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
			a.	Kuantitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kualitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Mobilitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Penyerasian Kependudukan				
			a.	Indikator Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Proyeksi Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Perencanaan Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	K.	KELUARGA BERENCANA					
		1.	Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk				
			a.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk				
			a.	Penyiapan Fasilitas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Profil dan Proyeksi Penduduk				
			a.	Data Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun Setelah Data	3 Tahun	Permanen

					Diperbarui (Update)		
		5.	Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk				
			a.	Penetapan Sasaran Parameter	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi Sasaran Parameter	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
		6.	Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk				
			a.	Pemanfaatan Profil dan Proyeksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Pemanfaatan Parameter	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		7.	Pengembangan Sistem				
			a.	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
		8.	Pengembangan Materi				
			a.	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
		9.	Monitoring dan Evaluasi				
			a.	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
			b.	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
		10.	Analisis Sosial		2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
		11.	Analisis Ekonomi		2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
		12.	Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan		2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen

		13.	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
		14.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah				
			a.	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		17.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		18.	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		19.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta				
			a.	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		20.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan				
			a.	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		21.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan				
			a.	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Berencana Wilayah Miskin Perkotaan			
			b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		22.	Kesertaan Keluarga Berencana Pria				
			a.	Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		23.	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		24.	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		25.	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		26.	Pelebagaan Bina Keluarga Balita dan Anak				
			a.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		27.	Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak				
			a.	Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		28.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja				
			a.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		29.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja				
			a.	Monitoring Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		30.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				

			a.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		31	Pelebagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
			a.	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		32.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
			a.	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		33.	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		34.	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		35.	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga				
			a.	Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		36.	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		37.	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		38.	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
			a.	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Kemiitraan Pusat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Pelayanan Keluarga Sejahtera			
		39.	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
			a.	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		40.	Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi				
			a.	Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		41.	Advokasi dan Pencitraan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		42.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi				
			a.	Promosi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Sarana Produksi Media Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Produk Media Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		43.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		44.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota				
			a.	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		45.	Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah				
			a.	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		46.	Tenaga Lini Lapangan				
			a.	Pengembangan Tenaga Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		47.	Institusi Masyarakat Pedesaan				
			a.	Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		48.	Mekanisme Operasional Lini Lapangan				
			a.	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		49.	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan				
			a.	Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		50.	Pengumpulan dan Pengolahan Data		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		51.	Analisis dan Evaluasi				
			a.	Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		52.	Sistem Aplikasi dan Bank Data				
			a.	Pengembangan Sistem Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengelolaan Bank Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		53.	Infrastruktur Teknologi Informasi				
			a.	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		54.	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi				
			a.	Dokumentasi dan Perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	L.	HUBUNGAN MASYARAKAT					

		1.	Keprotokolan				
			a.	Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Buku Tamu Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2.	Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat		1 Tahun selama Berlaku	1 Tahun	Musnah
		3.	Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan				
			a.	Kliping Koran	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Brosur/ Leaflet/Poster /Plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Pengumuman/Pembe ritaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		5.	Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah				
			a.	Hubungan Antarlembaga Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Hubungan dengan Perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			e.	Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			f.	Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		6.	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD		1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		7.	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota		1 Tahun	1 Tahun	Permanen

		8.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
		9.	Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
		10.	Pameran/Sayemara/Lomba /Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
		11.	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen	
		12.	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	Permanen	
VI	PEREKONOMIAN						
	A.	KETAHANAN PANGAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen	
		2.	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
			a.	Ketersediaan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Akses Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kerawanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Distribusi dan Cadangan Pangan				
			a.	Distribusi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Harga Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Cadangan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
			a.	Konsumsi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penganekaragaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Keamanan Pangan Segar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
			a.	Dewan Ketahanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penghargaan Ketahan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		7.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		8.	Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2.	PERDAGANGAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen	
		2.	Perdagangan Dalam Negeri				
			a.	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Bisa Usaha Jasa Perdangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

			c.	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
			d.	Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			m.	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			n.	Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			o.	Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			p.	Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			q.	Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				
			a.	Kelembagaan dan Informasi Standar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			b.	Kerja Sama Standardisasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	8 Tahun	Permanen
			c.	Perumusan dan Penerapan Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Tata Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e.	Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			f.	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			g.	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Fasilitas Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

			i.	Produk Pertambangan dan Aneka Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Jasa	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			l.	Kerja Sama	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			m.	Sarana dan Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			n.	Kelembagaan dan Penilaian	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			o.	UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			p.	Pengawasan	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			q.	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			r.	Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.		Perdagangan Berjangka Komoditi			
			a.	Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan Transaksi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengembangan Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			f.	Sistem Informasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah

			g.	Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			h.	Pengawasan Pasar Lelang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
			i.	Pengawasan Sistem Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		5.	Bimbingan Teknis		2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		6.	Evaluasi		2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	C.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
		1.	Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Kelembagaan Koperasi dan UKM				
			a.	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			c.	Keanggotaan Koperasi	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		3.	Produksi				

			a.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Pembiayaan				
			a.	Program Pendanaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Urusan Permodalan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e.	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			f.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		5.	Pemasaran dan Jaringan Usaha				
			a.	Perdagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Ekspor dan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Sarana dan Prasarana Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kemitraan dan Jaringan Usaha	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
			e.	Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			a.	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			e.	Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
			a.	Produktifitas dan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Restrukturisasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengembangan Sistem Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
			a.	Penelitian Koperasi	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
			b.	Penelitian UKM	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
			c.	Penelitian Sumber Daya	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengembangan Pengaderan UMK	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		9.	Kerja Sama Hubungan Antar lembaga		2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		10.	Pedagang Kaki Lima (PKL)				
			a.	Peraturan Perundang-Undangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Monitoring dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	D.	PERIKANAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perikanan Tangkap				

			a.	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
			b.	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pendaftaran Kapal Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Kelembgaan Usaha Penangkapan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			m.	Investasi dan Permodalan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			n.	Kenelayanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			o.	Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			p.	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Perikanan Budi Daya				
			a.	Potensi Lahan dan Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Informasi dan Distribusi Pembenihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Budidaya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Budidaya Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h.	Sertifikasi Budi Daya Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			i.	Data dan Statistik Perikanan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Hama dan Penyakit Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			k.	Perlindungan Lingkungan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			l.	Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			m.	Kewirausahaan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			n.	Pelayanan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			o.	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			p.	Promosi Usaha dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
			a.	Standarisasi Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Produk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Industri Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Pengembangan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			k.	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			m.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			n.	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			o.	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			p.	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			q.	Pengembangan Ekspor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			r.	Pengendalian Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			s.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			t.	Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			u.	Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			v.	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			w.	Investasi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			x.	Informasi dan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil				
			a.	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Informasi dan Evaluasi Spasial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Konservasi Wawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Konservasi Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h.	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			i.	Mitigasi Bencana Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			j.	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Rehabilitasi dan Reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			m.	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			n.	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			o.	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			p.	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			q.	Akses Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			r.	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			s.	Sosial Budaya Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			t.	Pengembangan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
			a.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengawasan Usaha Budidaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pengawasan Pencemaran Perairan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			i.	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			j.	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			k.	Perawatan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Pengawakan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			m.	Sistem Pemantauan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			n.	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			o.	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			p.	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			q.	Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			r.	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

			s.	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			t.	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Karantina Ikan				
			a.	Pemeriksaan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengasingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengakuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Penolakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			i.	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			j.	Permohonan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			k.	Pemasukan Formulir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			l.	Pemasukan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			m.	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			n.	Surat Perintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			o.	Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			p.	Penutupan Suatu Area	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			q.	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			r.	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			s.	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			t.	Instalasi Karantina Sementara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			u.	Lokasi Karantina	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	E.	PERTANIAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perlindungan Hortikultura				
			a.	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		3.	Perbenihan Hortikultura				
			a.	Penilaian Varietas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
			a.	Basis Data Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengendalian Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Pengelolaan Air Irigasi				
			a.	Pengembangan Sumber Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Pembiayaan Pertanian				
			a.	Data Informasi Pembiayaan Program	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
			b.	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pembiayaan Agribisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Pupuk Pestisida				
			a.	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pupuk Anorganik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pestisida	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Alat dan Mesin Pertanian				
			a.	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		9.	Perbenihan Tanaman Pangan				
			a.	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Produksi Benih Serealia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		10.	Budi Daya Serealia				
			a.	Padi Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Jagung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Serealia Lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		11.	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
			a.	Kedelai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Ubi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		12.	Tanaman Pangan				
			a.	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		13.	Pascapanen Tanaman Pangan				
			a.	Padi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Jagung dan Serealia alin	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kedelai dan Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		14.	Pengolahan Hasil Pertanian				
			a.	Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Mutu dan Standardiasi				
			a.	Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Akreditasi dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			d.	Kerja Sama dan Harmonisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Pengembangan Usaha dan Investasi				
			a.	Kemitraan dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Promosi Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.	Pemasaran Domestik				
			a.	Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Jaringan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		18.	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		19.	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
			a.	Hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		20.	Diseminasi		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		21.	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian				
			a.	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		22.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		23.	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		24.	Data Penelitian dan Pengembangan		2 Tahun Setelah Data Dipebarui (<i>Update</i>)	8 Tahun	Permanen
		25.	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan		1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		26.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				

			a.	Hak Cipta	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
			b.	Hak Paten Sederhana	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
			c.	Hak Paten Biasa	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
			d.	Hak Merek	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
			e.	Pendaftaran Varietas Tanaman	1 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	1 Tahun	Musnah
			f.	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
			g.	Permohonan HaKI yang Ditolak	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
		27.	Pelayanan Perizinan Pertanian				
			a.	Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		28.	Pelayanan Hukum				
			a.	Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pertimbangan Hukum	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
		29.	Karantina Pertania				
			a.	Karantina Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			b.	Karantina Hewan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		30.		Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		31.		Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	F.	PETERNAKAN					
		1.		Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.		Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			a.	Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pakan Ternak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Budi Daya Ternak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan (Permanen), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan (Permanen), Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen (Permanen), Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitari dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (Permanen), Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.		Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.		Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	G.	PERKEBUNAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Tanaman Semusim				
			a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perbenihan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Tanaman Rempah dan Penyegar				
			a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Tanaman Tahunan				
			a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perbenihan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Budidaya Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Perlindungan Perkebunan				
			a.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar			
			c.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Pascapanen dan Pembinaan Usaha				
			a.	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pascapanen Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Bimbingan Teknis Perkebunan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Evaluasi Perkebunan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	H.	PERINDUSTRIAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Iklim Usaha dan Kerja Sama				
			a.	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			d.	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		3.	Promosi Industri				
			a.	Industri Manufaktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Promosi Industri Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Standarisasi dan Teknologi				
			a.	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

		5.	Hak atas Kekayaan Intelektual				
			a.	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		6.	Industri Hijau				
			a.	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		7.	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		8.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		12.	Standardisasi				
			a.	Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		13.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
			a.	Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		14.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup				
			a.	Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		15.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
			a.	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

		16.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	I.	PERHUBUNGAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
		2.	Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
			a.	Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal	1 Tahun	1Tahun	Musnah
			e.	Jaringan Trayek Angkutan Antarkota/provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			g.	Penetapan Kelas Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			h.	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			i.	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		3.	Pengembangan Transportasi Jalan				
			a.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Pengujian Kendaraan Bermotor				
			a.	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Teknologi Kendaraan Bermotor				

			a.	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
			a.	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Perlengkapan Jalan				
			a.	Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			e.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		8.	Angkutan Penumpang				
			a.	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Izin Trayek antar Kota antar Provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

				Negara dan Antarkota/provinsi			
			e.	Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pemberian Subsidi Angkutan Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			g.	Angkutan Perintis	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			h.	Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		9.	Angkutan Barang				
			a.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Tarif Angkutan Barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pembinaan Angkutan Barang	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			e.	Izin Dispensasi Angkutan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		10.	Monitoring Operasional				
			a.	Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
			a.	Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Bimtek PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		12.	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan				

			Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			a.	Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			b.	Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		13.	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			a.	Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		14.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		15.	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
			a.	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, dan Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
			a.	Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Lintas Nasional dan Internasional			
			d.	Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.		Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		18.		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
			a.	Manajemen Lalu Lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau serta Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		19.		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
			a.	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Perambuan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		20.		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
			a.	Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		21.		Tarif dan Keperintisan			

			a.	Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		22.	Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
			a.	Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel, dan Perairan Daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		23.	Lalu Lintas Perkotaan				
			a.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		24.	Angkutan Perkotaan				
			a.	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Jaringan Trayek Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		25.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan				
			a.	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Penumpang dan/atau Barang			
			b.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		26.	Dampak Transportasi Perkotaan				
			a.	Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Masterplan Transportasi Perkotaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		27.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
			a.	Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kualifikasi Unit Pengkajian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

			c.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		28.	Pengembangan Keselamatan				
			a.	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Harmonisasi Kebijakan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		29.	Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
			a.	Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		30.	Bina Keselamatan Angkutan Umum				
			a.	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		31.	Audit Keselamatan				
			a.	Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Audit Faktor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan			
		32.	Inspeksi Keselamatan				
			a.	Pedoman Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		33.	Parkir				
			a.	Surat Tugas Juru Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta	2 Tahun Setelah Ada Izin Baru	3 Tahun	Musnah
			c.	Surat Tugas TKP Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	J.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		1.	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
		2.	Telekomunikasi				
			a.	Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Penyiaran				
			a.	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal				
			a.	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			c.	Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Pengendalian Informatika				
			a.	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	<i>e-Government</i>				
			a.	Tata Kelola <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Aplikasi Layanan Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	<i>e-Business</i>				
			a.	Tata Kelola <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat				
			a.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Pemberdayaan Industri Informatika				
			a.	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			c.	Industri Perangkat Lunak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Industri Konten Multimedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Keamanan Informasi				
			a.	Tata Kelola Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Teknologi Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Penyidikan dan Penindakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Budaya Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Komunikasi Publik				
			a.	Tata Kelola Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengelolaan Opini Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Layanan Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		12.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
			a.	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
			b.	Informasi Perekonomian	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
			c.	Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
		13.	Pengelolaan Media Publik				
			a.	Media Cetak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
			b.	Media <i>Online</i>	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
			c.	Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Musnah
		14.	Kemitraan Komunikasi				
			a.	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak	3 Tahun	Musnah

					Telah Ditunaikan		
			b.	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
			c.	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		15.	Infrastruktur Informatika				
			a.	Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Piranti Teknologi Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Keamanan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Sistem dan Data				
			a.	Portal dan Konten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.	Pusat Kerja Sama				
			a.	Kerja Sama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permamen
			b.	Kerja Sama Bilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permamen
		18.	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
			a.	Pelayanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Hubungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		19.	Evaluasi		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	K.	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
		1.	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengembangan Destinasi Wisata				
			a.	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Industri Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			d.	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pemasaran Pariwisata				
			a.	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Promosi Pariwisata Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pencitraan Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
			a.	Pengembangan Industri Perfilman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan Seni Rupa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK				
			a.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Desain dan Arsitektur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kerja Sama dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Pegembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
			a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	L.	STATISTIK					
		1.	Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen

		2.	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
			a.	Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada <i>Stakeholder</i> dan Sumber Data (<i>Leaflet</i> , Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Rule</i> Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			c.	Pelaksanaan Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen(Penerimaan /Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batch ing</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi,	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

				Laporan Konsistensi Tabulasi			
			e.	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			f.	Diseminasi Hasil Sensus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Survei				
			a.	Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Persiapan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			c.	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen(Penerimaan /Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			e.	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara, Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/ Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			f.	Diseminasi Hasil Survei	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	KonsolidasiI Data Statistik				
			a.	Kompilasi Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Analisis Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Penyusunan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	M.	KETENAGAKERJAAN					

		1.	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan Tenaga Kerja				
			a.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
			a.	Penerapan Standar Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
			a.	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga	3 Tahun Setelah Kerja Sama Selesai dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	7 Tahun	Permanen
		5.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
			a.	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Tenaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Bina Pemagangan				

			a.	Pemagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemagangan Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		7.	Produktivitas dan Kewirausahaan				
			a.	Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Pengembangan Pasar Kerja				
			a.	Informasi Pasar Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Analisis Pasar Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Bursa Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
			a.	Antarkerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
			a.	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Padat Karya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Terapan Teknologi Tepat Guna	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11.	Standardisasi Profesi				
			a.	Sistem Informasi dan Registrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pembakuan Akreditasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
			a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perjanjian Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kesejahteraan Pekerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13.	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
			a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kelembagaan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		14.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
			a.	Pengupahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
			a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		16.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
			a.	Pengawasan Norma Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
			a.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			b.	Pengawasan Norma Kerja Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Kerja Sama Lintas Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		18.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
			a.	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		20.	Bina Penegakan Hukum				
			a.	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kerja Sama Penegakan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		21.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
			a.	Analisis dan Standardisasi bidang K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Hasil Kajian, Perencanaan dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		22.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
			a.	Program, Analisis dan Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

				Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
			b.	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kerja Sama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	N.	PENANAMAN MODAL					
		1.	Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan Penanaman Modal				
			a.	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Perencanaan Industri Manufaktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Perencanaan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
			a.	Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Pemberdayaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Promosi Penanaman Modal				
			a.	Pengembangan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Analisis Strategi Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			c.	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Promosi Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Fasilitasi Promosi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pameran dan Sarana Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Kerja Sama Penanaman Modal				
			a.	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kerja Sama Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
			a.	Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Data Realisasi Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Pelayanan Penanaman Modal				
			a.	Pelayanan Aplikasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pelayanan Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Pelayanan Konsultasi Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Pelayanan Nonperizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			e.	Pelayanan Fasilitas	2 Tahun	7 Tahun	Permanen
	O.	PERTANAHAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				
			a.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Data dan Informasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				

			a.	Penatagunaan Tanah	2 Tahun Setelah Izin Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			b.	Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			c.	Penguatan Atas Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Sengketa Tanah				
			a.	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
			b.	Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	P.	TRANSMIGRASI					
		1.	Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Penyediaan Tanah Transmigrasi				
			a.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengurusan Legalitas Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Dokumentasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Advokasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				
			a.	Penyiapan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyiapan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penyiapan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Evaluasi Kelayakan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
			a.	Penyiapan Calon Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyiapan Perpindahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pelaksanaan Perpindahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Penataan dan Adaptasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Partisipasi Masyarakat				
			a.	Promosi dan Motivasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kerja Sama Antardaerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			d.	Pelayanan Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
			a.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Bina Sistem Informasi	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	3 Tahun	Permanen
			c.	Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
			a.	Bantuan Pangan dan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Fasilitas Sosial Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Pengembangan Usaha				
			a.	Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Lembaga Ekonomi dan permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
			a.	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		10.	Penyerasian Lingkungan				

			a.	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
VII.	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN						
	A.	PEKERJAAN UMUM					
		1.	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Penatagunaan Sumber Daya Air				
			a.	Perencanaan Wilayah Sungai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Pemanfaatan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air				
			a.	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Informasi dan Data Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Pengelolaan Sumber Daya Air				
			a.	Pengelolaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
			a.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			b.	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		6.	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)				
			a.	Perencanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pemrograman Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Pengembangan Jaringan Jalan				
			a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Pembangunan Jalan				
			a.	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainase	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		9.	Preservasi Jalan				
			a.	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		10.	Pengelolaan Jembatan				
			a.	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			b.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		11.	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
			a.	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		12.	Pengaturan Jalan Tol				
			a.	Persiapan pengusahaan jalan tol	2 Tahun	p	Permanen
			b.	Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
			c.	Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
		13.	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				
			a.	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		14.	Pengembangan Kawasan Permukiman				
			a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Kawasan Permukiman Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		15.	Pembinaan Penataan Bangunan				
			a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				

			a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		17.	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman				
			a.	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		18.	Pemantauan dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	B.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
			a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pola Pembiayaan Perumahan				
			a.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pola Investasi Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				

			a.	Sumber Pembiayaan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Sumber Pembiayaan Sekunder	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Perencanaan Penyediaan Perumahan				
			a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Analisa Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		6.	Penyediaan Rumah Susun				
			a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		7.	Penyediaan Rumah Khusus				
			a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			f.	Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Pelaksanaan Bantuan Simultan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		8.	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
			a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Fasilitasi Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		9.	Investasi Infrastruktur				

			a.	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		10.	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
			a.	Sistem Penyelenggaraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kontrak Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Konstruksi Berkelanjutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		11,	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
			a.	Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		12.	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
			a.	Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		13.	Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
			a.	Peningkatan Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		14.	Peningkatan Jasa Konstruksi				
			a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		15.	Penerapan Teknologi Konstruksi				
			a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

				Penerapan Teknologi Konstruksi			
			b.	Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		16.	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
			a.	Antarsektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Antarwilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		17.	Pengembangan Kawasan Strategis				
			a.	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		18.	Pengembangan Kawasan Perkotaan				
			a.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Analisis Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		19.	Pemantauan dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	C.	TATA RUANG (TATA KOTA)					
		1.	Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan				
			a.	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
			b.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
			c.	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
			d.	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen

			e.	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
			f.	Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
			g.	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		3.	Pemanfaatan dan Pengendalian				
			a.	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			b.	Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			c.	Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		4.	Pemetaan				
			a.	Peta Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Survei Pemetaan Ruang Darat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Survei Pemetaan Ruang Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Survei Pemetaan Ruang Udara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	D.	LINGKUNGAN HIDUP					
		1.	Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
			a.	Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
			a.	Evaluasi Penerapan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Ekonomi Lingkungan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Dampak Lingkungan				
			a.	Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			b.	Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		6.	Pemantauan dan Pengawasan				
			a.	Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			d.	Udara Sumber Bergerak	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		7.	Evaluasi dan Pengembangan				
			a.	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Udara Sumber Bergerak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		8.	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan				
			a.	Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Keamanan Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		9.	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
			a.	Kerusakan Ekosistem	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		10.	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer				
			a.	Perangkat Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		11.	Adaptasi Perubahan Iklim				
			a.	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

				Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim			
			b.	Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		12.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
			a.	Registrasi dan Notifikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			b.	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		13.	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun				
			a.	Pengumpulan dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengangkutan dan Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penimbunan dan Dumping	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		14.	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				
			a.	Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		15.	Pengelolaan Sampah				
			a.	Pembatasan Sampah	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			b.	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			c.	Pembentukan Dewan Adipura	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			d.	Penetapan pemenang adipura	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		16.	Hukum Administrasi Lingkungan				
			a.	Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Penataan Hukum Administrasi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		17.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
			a.	Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai	3 Tahun	Permanen

					Kekuatan Hukum Tetap		
			b.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
		18.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan				
			a.	Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			c.	Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		19.	Komunikasi Lingkungan				
			a.	Pengembangan Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Publikasi dan Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		20.	Penguatan Inisiatif Masyarakat				
			a.	Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Kearifan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			Peningkatan Peran Masyarakat				
		21.	a.	Masyarakat Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Masyarakat Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		22.	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
			a.	Organisasi Sosial Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		23.	Data dan Informasi Lingkungan				
			a.	Pengelolaan Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Pengelolaan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Pengembangan Perangkat Lunak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		24.	Kelembagaan Lingkungan				
			a.	Kelembagaan dan Tata Laksana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		25.	Standarisasi dan teknologi				

			a.	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		26.	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
			a.	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
VIII	PENGAWASAN						
	A.	PENGAWASAN INTERNAL					
		1.	Rencana Pengawasan				
			a.	Rencana Strategis Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			b.	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2.	Pelaksanaan Pengawasan				
			a.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Permanen
			b.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			c.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen

			d.	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e.	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun Setelah Proses Data Di-Update	3 Tahun	Permanen
			f.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			h.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			i.	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IX.	KEPEGAWAIAN						
	A.	SUMBER DAYA MANUSIA					
		1.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
			a.	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan	2 Tahun Sejak Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Musnah
			b.	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			d.	Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	2 Tahun Sejak Standar Baru Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
		2.	Formasi dan Pengadaan Pegawai				
			a.	Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah

				Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku		
			b.	Proses Rekrutmen/ Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			e.	Pengangkatan ASN	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
			f.	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			g.	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			h.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		3.	Mutasi Pegawai				
			a.	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			b.	Kenaikan Pangkat/Golongan/ Jabatan	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah

			c.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
			d.	Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
			e.	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
			f.	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Pengembangan Karir				
			a.	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi Lain/ Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta	1 Tahun Sejak Selesaiannya Pertanggungja waban Suatu Penugasan	1 Tahun	Musnah
			b.	Penyesuaian Ijazah	1 Tahun Sejak Data Diperbarui (Update)	1 Tahun	Musnah
			c.	Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			d.	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun Sejak Berakhirnya Masa Tahun Anggaran	1 Tahun	Musnah
		5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara				

			a.	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			c.	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		6.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
			a.	Kode Etik Pegawai	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			b.	Disiplin	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			c.	Pemberhentian dengan Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			d.	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			e.	Pemberhentian Sementara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah

					atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku		
			f.	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
		7.	Bantuan Hukum		2 Tahun Sejak Selesaiannya Pertanggungja waban Suatu Penugasan	3 Tahun	Musnah
		8.	Status dan Kedudukan Pegawai				
			a.	Status Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			b.	Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			c.	Keberatan Pegawai	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			d.	Perselisihan/Sengket a Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		9.	Sistem Informasi Kepegawaian				
			a.	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			b.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			c.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen

			d.	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun Sejak Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		10.	Pengawasan dan Pengendalian				
			a.	Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			f.	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
		11.	Administrasi Pegawai				
			a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun Sejak Selesaiya Pertanggungja waban Suatu Penugasan	1 Tahun	Musnah
			b.	Cuti Sakit	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			c.	Cuti Bersalin	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			d.	Cuti Tahunan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			e.	Cuti Alasan Penting	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan	1 Tahun	Musnah

					Selesai Dilaksanakan		
			f.	Cuti Besar	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			g.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			h.	Karpeg/KPE/Karis/K arsu	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
			i.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
			j.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
			k.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
			l.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
			m.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		12.	Kesejahteraan Pegawai				
			a.	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			b.	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			c.	Tabungan Perumahan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			d.	Bantuan Sosial	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah

			e.	Pakaian Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			f.	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			g.	Pemberian Tali Kasih	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			h.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			i.	Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
			j.	Rekam Medis	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
		13.	Administrasi Perseorangan				
			a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
			b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
			c.	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
			d.	Sekretaris Daerah	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
			e.	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
		14.	Penilaian Kompetensi				
			a.	Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b.	Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	B.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah		2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pendidikan dan Pelatihan				
			a.	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi	3 Tahun	Permanen

					Ditingkatkan dan Dikembangkan		
			b.	Pedoman-Pedoman Kediklatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Kurikulum-kurikulum Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d.	Modul-Modul Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			e.	Panduan Fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			f	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Notulen Sosialisasi/ Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			h.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			i.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Widyaiswara				
			a.	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			c.	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
			e.	Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			f	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			g.	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
		4.	Penyelenggaraan Diklat				
			a.	Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			b.	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

				Penyelenggaraan Diklat			
			d.	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Sistem Informasi Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
			f	Monitoring Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			g.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5.	Alumni		2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
X.	KEUANGAN						
	A.	KEUANGAN DAERAH					
		1.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)				
			a.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2.	Penyusunan Anggaran				
			a.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c.	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

			d.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pelaksanaan Anggaran				
			a.	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			b.	Pendapatan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			c.	Belanja	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			d.	Pembiayaan Daerah	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			e.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			f.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			g.	Daftar Gaji	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			h.	Kartu Gaji	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
			i.	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			j.	Laporan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		4.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri				

			a.	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen
			b.	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai(<i>Green Book</i>)	1 Tahun Setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 Tahun	Permanen
			c.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	1 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			d.	Dokumen <i>Loan Agreemeent</i> (PHLN), antara lain: <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan Lender	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			e.	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			f	Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			g.	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah
			h.	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah
			i.	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			j.	<i>Staff Appraisal Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen

			k.	Report/Laporan	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			l.	Laporan Hutang Daerah	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			m.	Completion Report/Annual Report	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
			n.	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 Tahun Setelah Diperbarui	1 Tahun	Permanen
		5.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)		1 Tahun Setelah Ada Pejabat Pengganti	1 Tahun	Permanen
		6.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
			a.	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen
			b.	Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen
			c.	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			d.	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan /Semesteran	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		7.	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
			a	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			b.	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP- Daftar Perincian	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

				Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: <i>Copy</i> Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan			
			c.	Buku Rekening Bank	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			d.	Keputusan Pembukuan Rekening	1 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	1 Tahun	Permanen
			e.	Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluar an (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	3 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	7 Tahun	Musnah
		8.	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
			a.	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			b.	Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		9.	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan		2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

			Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Stand ar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
		10.	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
			a	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			b.	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
			c.	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah

				Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank			
			d.	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran /Revisinya	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungja waban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		11.	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
			a	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
			b.	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
			c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
			d.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 Tahun Setelah Tagihan Tuntutan Perbendahara an/Tuntutan Ganti Rugi Dilunasi	3 Tahun	Dinilai kembali
		12.	Anggaran Daerah				
			a	Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		13.	Pendapatan dan Investasi Daerah				
			a	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

				Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
			b.	Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			c.	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			d.	Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah			
			e.	Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		14.	Fasilitasi Dana Perimbangan				
			a.	Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar.	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

				Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus			
			c.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			d.	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			e.	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		15.	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				

			a.	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			b.	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			c.	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			d.	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e.	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

				Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP			KLASIFIKAS I KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S	T								
I.	000				UMUM							
		000.1			A.	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN						
			000.1.1			1.	Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
			000.1.2			2.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				000.1.2.1			a.	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.2.2			b.	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.2.3			c.	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			000.1.3			3.	Perjalanan Dinas Luar Negeri					
				000.1.3.1			a.	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.3.2			b.	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.3.3			c.	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.4			4.	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.5			5.	Rapat Pimpinan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.6			6.	Penyediaan Konsumsi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.7			7.	Pengurusan Kendaraan Dinas					
				000.1.7.1			a.	Pengurusan Surat-Surat kendaraan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.7.2			b.	Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.1.7.3			c.	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8			8	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor					
				000.1.8.1			a.	Pertamanan/ <i>Landscape</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.8.2			b.	Penghijauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.8.3			c.	Perbaikan Gedung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.8.4			d.	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.8.5			e.	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.8.6			f.	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.9			9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer					
				000.1.9.1			a.	Perbaikan/Pemeliharaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.1.9.2			b.	Pemasangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.10			10	Ketertiban dan Keamanan					
				000.1.10.1			a.	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.1.10.2			b.	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.11			11.	Administrasi Pengelolaan Parkir		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.12			12.	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.2			B.	PERLENGKAPAN						
			000.2.1			1.	Inventarisasi dan Penyimpanan					
				000.2.1.1			a.	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.1.2			b.	Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.2			2.	Pemeliharaan Peralatan Kantor					

				000.2.2.1			a.	Data Hasil Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.2.2			b.	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.3			3.	Distribusi					
				000.2.3.1			a.	Barang Habis Pakai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.3.2			b.	Barang Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.4			4.	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.5			5.	Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.3			C.	PENGADAAN						
			000.3.1			1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa,		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

							Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan				
			000.3.2			2.	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.3			3.	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.4			4.	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.5			5.	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: <i>Database</i> Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, <i>Database</i> Kontrak, <i>Database</i> Pengadaan Barang/Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			000.3.6			6.	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4			D.	PERPUSTAKAAN					
			000.4.1			1.	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.2			2.	Deposit Bahan Pustaka				
				000.4.2.1		a.	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.2.2		b.	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.2.3		c.	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.2.4		d.	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.2.5		e.	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.3			3.	Koleksi Pustaka				
				000.4.3.1		a.	Pembelian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.4.3.2			b.	Hibah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.3			c.	Hadiah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.4			d.	Tukar Menukar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.5			e.	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.6			f.	Terbitan Internal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.7			g.	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.8			h.	Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.4			4.	Pengolahan Bahan Pustaka		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.5			5.	Pangkalan Data Katalog Koleksi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.6			6.	Layanan Perpustakaan					
				000.4.6.1			a.	Keanggotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.4.6.2			b.	Peminjaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.6.3			c.	Pengembangan Gemar Baca	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.7			7.	Kerja Sama Perpustakaan					
				000.4.7.1			a.	MoU	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.4.7.2			b.	Perjanjian Kerja Sama	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.4.7.3			c.	Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.8			8.	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan					
				000.4.8.1			a.	Pengembangan Situs Web	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.8.2			b.	Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.8.3			c.	Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.4.8.4			d.	Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.9			9.	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.10			10.	Konservasi					
				000.4.10.1			a.	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.10.2			b.	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.10.3			c.	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.11			11.	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.12			12.	Transformasi Digital		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.13			13.	Kurasi Digital		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.14			14.	Pengembangan Perpustakaan					
				000.4.14.1			a.	Perpustakaan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.4.14.2			b.	Perpustakaan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.14.3			c.	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.14.4			d.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5			E.	KEARSIPAN						
			000.5.1			1.	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.2			2.	Pembinaan Kearsipan					
				000.5.2.1			a.	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.1			b.	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.3			c.	Penilaian Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.4			d.	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Penetapan Arsiparis Teladan				
				000.5.2.5			e.	<i>Database</i> Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.6			f.	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.7			g.	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.8			h.	Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.9			i.	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.10			j.	Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan				
				000.5.2.11			k.	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.3			3.	Pengelolaan Arsip Dinamis					
				000.5.3.1			a.	Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.2			b.	Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.3			c.	Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.4			d.	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip				
				000.5.3.5			e.	Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.4			4.	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.5			5.	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.6			6.	Penyusutan Arsip					

				000.5.6.1			a.	Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.6.2			b.	Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusanahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.6.3			c.	Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan				
			000.5.7			7.		Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.8			8.		Database Pengelolaan Arsip Dinamis				
				000.5.8.1			a.	Database Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.8.2			b.	Database Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9			9.		Pengelolaan Arsip Statis				
				00.5.9.1			a.	Akuisisi, Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan				
				000.5.9.2			b.	Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.3			c.	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.4			d.	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.5			e.	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, <i>Guide</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.5.9.6			f.	Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.7			g.	Preservasi Kuratif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.8			h.	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.9.9			i.	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			00.5.10			10.	Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
			000.5.11			11.	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	

			000.5.12			12.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.13			13.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.14			14.	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.15			15.	Pengawasan Kearsipan				
				000.5.15.1		a.	Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.15.2		b.	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.15.3		c.	Sanksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		000.6			F.	PERSANDIAN					
			000.6.1			1.	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.6.2			2.	Pengamanan Persandian				
				000.6.2.1		a.	Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				000.6.2.2			b.	Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.6.2.3			c.	Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			000.6.3			3.	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi					
				000.6.3.1			a.	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.3.2			b.	Administrasi Pengkajian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.3.3			c.	Pelaksanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.3.4			d.	Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.6.4			4.	Pembinaan dan Pengendalian Persandian					
				000.6.4.1			a.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.4.2			b.	Jaring Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			000.6.5			5.	Layanan Sertifikasi Elektronik					
				000.6.5.1			a.	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.2			b.	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.3			c.	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.4			d.	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.5			e.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.6			f.	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.7			g.	Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7			G.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
			000.7.1			1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang					
				000.7.1.1			a.	Musrenbang Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.7.1.2			b.	Musrenbang Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.3			c.	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.4			d.	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.5			e.	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.6			f.	Musrenbang Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.2			2.	Perencanaan Pembangunan Daerah					
				000.7.2.1			a.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.1			b.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.3			c.	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.4			d.	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.5			e.	Rencana Pembentukan Satuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Kerja Perangkat Daerah				
				000.7.2.6			f.	Program Kerja Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.7			g.	Penetapan/Kontrak Kinerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.8			h.	Laporan Berkala	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.9			i.	Laporan Insidental	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.10			j.	Evaluasi Program	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.3			3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.4			4.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.5			5.	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6			6.	Aksi Strategis Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.7.6.1			a.	Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.6.2			b.	Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.6.3			c.	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.6.4			d.	Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.6.5			e.	Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.7			7.	Perencanaan Pendanaan Pembangunan					
				000.7.7.1			a.	Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.7.2			b.	Pendanaan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.7.3			c.	Kerja Sama Pembangunan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.7.4			d.	Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.7.7.5			e.	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.8			H.	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
			000.8.1			1.	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				000.8.1.1			a.	Pembentukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.1.2			b.	Pengubahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.1.3			c.	Pembubaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.2			2.	Uraian Jabatan dan Tata Kerja					
				000.8.2.1			a.	Analisa Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.2.2			b.	Analisa Beban Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.3			3.	Ketatalaksanaan					
				000.8.3.1			a.	Proses Bisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.2			b.	Standar Pelayanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.8.3.3			c.	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.4			d.	Pelayanan Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.4			4.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.5			5.	Evaluasi Kelembagaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.6			6.	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi					
				000.8.6.1			a.	Budaya Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.6.2			b.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.6.3			c.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.9			I.	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN						
			000.9.1			1.	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			000.9.2			2.	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.3			3.	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.4			4.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.5			5.	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.6			6.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
				000.9.6.1		a.	Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.6.2		b.	Statistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				000.9.6.3			c.	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.7			7.	Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.8			8..	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.9			9.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.10			10.	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
II.	100			PEMERINTAHAN								
		100.1		A. OTONOMI DAERAH								
			100.1.1			1.	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.2			2.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.3			3.	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

							Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
			100.1.4			4.	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
				100.1.4.1			a.	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.2			b.	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.3			c.	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.4			d.	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.5			e.	Assosiasi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.5			5.	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.6			6.	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah					

							(Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
				100.1.6.1			a.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.6.2			b.	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.6.3			c.	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.1.7			7.	LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.2			B.	PEMERINTAHAN UMUM						
			100.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.2.2			2.	Dekonsentrasi dan Kerja Sama					
				100.2.2.1			a.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				100.2.2.2			b.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.3			c.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.4			d.	Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.5			e.	Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.2.3			3.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan					
				100.2.3.1			a.	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.2			b.	Pengembangan dan Penataan Batas Antarnegara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.3			c.	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				100.2.3.4			d.	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.5			e.	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3			C.	HUKUM						
			100.3.1			1.	Program Legislasi					
							a.	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
							b.	Program Legislasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.2			2.	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.3			3.	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah					

				100.3.3.1			a.	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.3.2			b.	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.3.3			c.	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.3.4			d.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.3.5			e.	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.3.6			f.	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.4			4.	Instruksi/Surat Edaran					
				100.3.4.1			a.	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.4.2			b.	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.4.3			c.	Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.4.4			d.	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.5			5.	Surat Perintah					

				100.3.5.1			a.	Surat Perintah Gubernur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.2			b.	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.3			c.	Surat Perintah Walikota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.4			d.	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.6			6.	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.7			7.	Nota Kesepakatan/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama					
				100.3.7.1			a.	Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.7.2			b.	Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

			100.3.8			8.	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Referensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.9			9.	Sosialisasi/Penyuluhan/Pe mbinaan Hukum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.10			10.	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Esellon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.11			11.	Kasus/Sengketa Hukum				
				100.3.11.1		a.	Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran	Terbatas	Esellon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.11.2		b.	Perdata Kasus/Sengketa Perdata	Terbatas	Esellon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.11.3		c.	Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Unit Kerja Terkait

											merusak kemitraan dan reputasi	
				100.3.11.4			d.	Perburuhan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.11.5			e.	Arbitrase	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.11.6			f.	Sengketa Adat	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.12			12.	Perizinan		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.13			13.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
				100.3.13.1			a.	Hak Cipta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.13.2			b.	Hak Paten	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				100.3.13.3			c.	Hak Desain Industri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.13.4			d.	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.13.5			e.	Hak Merk	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.13.6			f.	Permohonan HaKI yang Ditolak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
III.	200				POLITIK							
		200.1			A.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
			200.1.1			1.	Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.1.2			2.	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
				200.1.2.1			a.	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				200.1.2.2			b.	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.2.3			c.	Bela Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.2.4			d.	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.2.5			e.	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.1.3			3.	Kewaspadaan Nasional					
				200.1.3.1			a.	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.3.2			b.	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.3.3			c.	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Unit Kerja Terkait

											merusak kemitraan dan reputasi	
				200.1.3.4			d.	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.3.5			e.	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
			200.1.4			4.	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan					
				200.1.4.1			a.	Ketahanan Seni	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.2			b.	Ketahanan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.3			c.	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.4			d.	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				200.1.4.5			e.	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.6			f.	Fasilitasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.7			g.	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.8			h.	Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.9			i.	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.10			j.	Fasilitasi Sengketa Ormas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.11			k.	Fasilitasi Ormas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.1.5			5.	Politik Dalam Negeri					
				200.1.5.1			a.	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.2			b.	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.3			c.	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				200.1.5.4			d.	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.5			e.	Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.6			f.	Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.7			g.	Database Parpol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.8			h.	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.9			i.	Pemilihan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.1.6			6.	Ketahanan Ekonomi					
				200.1.6.1			a.	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait

				200.1.6.2			b.	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.6.3			c.	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.6.4			d.	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
		200.2			B.	PEMILU						
			200.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
			200.2.2			2.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih					
				200.2.2.1			a.	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				200.2.2.2			b.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.2.3			c.	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.2.4			d.	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.2.5			e.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.3			3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu					
				200.2.3.1			a.	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.3.2			b.	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.3.3			c.	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.3.4			d.	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			200.2.4			4.	Penetapan Peserta Pemilu					
				200.2.4.1			a.	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.2			b.	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.3			c.	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.4			d.	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.5			e.	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.5			5.	Pencalonan Pemilu					
				200.2.5.1			a.	Petunjuk Teknis Pencalonan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.2			b.	Surat Pencalonan Pendaftaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				200.2.5.3			c.	Daftar Bakal Calon	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.4			d.	Dokumen Persyaratan Masing-Masing Bakal Calon	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.5			e.	Dokumen Verifikasi Administrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.6			f.	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.6			6.	Kampanye Pemilu					
				200.2.6.1			a.	Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.6.2			b.	Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				0200.6.3			c.	Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.7			7.	Dana Kampanye					
				200.2.7.1			a.	Pedoman Audit Dana Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.7.2			b.	Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.7.3			c.	Laporan Hasil Audit Dana Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			200.2.8			8.	Pemungutan dan Penghitungan Suara					
				200.2.8.1			a.	Keputusan KPU tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.8.2			b.	Master Surat Suara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.8.3			c.	Surat Suara yang Terpakai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.8.4			d.	Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.8.5			e.	Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.9			9.	Penetapan Hasil Pemilu		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.10			10.	Perselisihan Hasil Pemilu					
				200.2.10.1			a.	Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.10.2			b.	Jawaban dan Kesimpulan Termohon	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.10.3			c.	Salinan Putusan Lembaga Peradilan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			200.2.11			11.	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
IV.	300				KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
		300.1			A.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
			300.1.1			1.	Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.2			2.	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja				
				300.1.2.1			a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.1.2.2			b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.3			3.	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.4			4.	Perlindungan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.5			5.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait

			300.1.6			6.	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
		300.2			B.	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN					
			300.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.2			2.	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
				300.2.2.1		a.	Rencana dan Standardisasi dan Pengawakan dan Perbekalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.2		b.	Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.3		c.	Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				300.2.2.4			d.	Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.5			e.	Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.6			f.	Registrasi BEACON	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.3			3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.4			4.	Potensi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.5			5.	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan					
				300.2.5.1			a.	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.2			b.	Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.3			c.	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				300.2.5.4			d.	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.5			e.	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.6			6.	Operasi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.7			7.	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.8			8.	Operasi Komunikasi					
				300.2.8.1			a.	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.8.2			b.	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.8.3			c.	Registrasi BEACON	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.9			9.	Inventarisasi dan Pemeliharaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.10			10.	Pengembangan Sistem Informasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			300.2.11			11.	Penyajian dan Layanan Informasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.12			12.	Pelapooran dan Evaluasi					
				300.2.12.1			a.	Laporan Harian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.2			b.	Laporan Bulanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.3			c.	Laporan Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.4			d.	Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
V.	400				KESEJAHTERAAN RAKYAT							
		400.1			A.	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						
			400.1.1			1.	Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.1.2			2.	Pembangunan Sumber Daya					
				400.1.2.1			a.	Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.1.2.2			b.	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.2.3			c.	Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.2.4			d.	Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.2.5			e.	Fasilitasi Teknologi dan Inovasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.2.6			f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.2.7			g.	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.1.3			3.	Peningkatan Infrastruktur					
				400.1.3.1			a.	Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.3.2			b.	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.3.3			c.	Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.1.3.4			d.	Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.3.5			e.	Fasilitasi Energi dalam Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.3.6			f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.3.7			h.	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.1.4			4.	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha					
				400.1.4.1			a.	Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.2			b.	Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.3			c.	Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.4			d.	Fasilitasi Kemitraan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.5			e.	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.1.4.6			f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.7			g.	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.8			h.	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.9			i.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.10			j.	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.11			k.	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.12			l.	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.4.13			m.	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.1.4.14			n.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.1.5			5.	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya					
				400.1.5.1			a.	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.2			b.	Penguatan Organisasi Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.3			c.	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.4			d.	Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.5			e.	Ketenagakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.6			f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.5.7			g.	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.1.6			6.	Pengembangan Daerah Khusus					

				400.1.6.1			a.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.2			b.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.3			c.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.4			d.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.5			e.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.6			f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.1.6.7			g.	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.2			B.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
			400.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.2.2			2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum					
				400.2.2.1			a.	Data Gender	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.2.2			b.	Advokasi dan Fasilitasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3			3.	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)					
				400.2.3.1			a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.3.2			b.	Data Perlindungan Perempuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.3.3			c.	Advokasi dan Fasilitasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.3.4			d.	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.2.3.5			e.	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.3.6			f.	Analisis dan Penyajian Informasi Gender	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.3.7			g.	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.4			4.	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)					
				400.2.4.1			a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.2			b.	Data Perlindungan Anak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.3			c.	Advokasi dan Fasilitasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.4			d.	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.2.4.5			e.	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.5			5.	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)					
				400.2.5.1			a.	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.2			b.	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.3			c.	Data Tumbuh Kembang Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.4			d.	Advokasi dan Fasilitasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.5			e.	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.6			f.	Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.6			6.	Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.2.7			7.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.8			8.	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3			C.	PENDIDIKAN					
			400.3.1			1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.2			2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
				400.3.2.1		a.	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.2		b.	Pelatihan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.3		c.	Peringatan Hari Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.4		d.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.3			3.	Pendidikan Masyarakat				
				400.3.3.1		a.	Penyelenggaraan Program	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.2		b.	Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.3.3.3			c.	Pembinaan Program	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.4			d.	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.5			e.	Pameran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.6			f.	Rapat Koordinasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.7			g.	Sosialisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.8			h.	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.4			4.	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.5			5.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama					
				400.3.5.1			a.	Kurikulum, Bahan Ajar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.2			b.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.3			c.	Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.3.5.4			d	Lomba, Penghargaan, Penganugerahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.5			e.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.6			f.	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.6			6.	Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus					
				400.3.6.1			a.	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.2			b.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.3			c.	Lomba, Festival	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.4			d	Sosialisasi, Bimtek	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.5			e.	Pendataan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.6			f.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.7			7.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik					

				400.3.7.1			a.	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.2			b.	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.3			c.	Sertifikasi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.4			d	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.5			e.	Peningkatan Kesejahteraan Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.6			f.	Sosialisasi, Bimtek	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.7			g.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.8			8.	Sekolah Menengah Atas					
				400.3.8.1			a.	Kurikulum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.2			b.	Bahan Ajar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.3			c.	Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.3.8.4			d.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.5			e.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.6			f.	Lomba, Sayembara, Festival	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.7			g.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.8			h.	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.9			9.	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus					
				400.3.9.1			a.	Bahan Ajar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.2			b.	Petunjuk Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.3			c.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.4			d.	Sosialisasi, Bimtek	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.5			e.	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.3.9.6			f.	Kurikulum/Bahan Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.7			g.	Alat Bantu Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.8			h.	Pendataan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.9			i.	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.10			10.	Pendidik dan Tenaga Pendidik					
				400.3.10.1			a.	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.2			b.	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.3			c.	Sertifikasi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.4			d	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.5			e.	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.3.10.6			f.	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.7			g.	<i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.8			h.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.11			11.	Penilaian Pendidikan					
				400.3.11.1			a.	Penilaian Akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.3.11.2			b.	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.3.11.3			c.	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.3.12			12.	Data dan Statistik Pendidikan					
				400.3.12.1			a.	Data Peserta Sidik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.12.2			b.	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.13			13.	Prasarana dan Sarana Pendidikan					

				400.3.13.1			a.	Prasarana Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.13.2			b.	Sarana Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.13.3			c.	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4			D.	KEOLAHRAGAAN						
			400.4.1			1.	Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.2			2.	Pengelolaan Olahraga Pendidikan					
				400.4.2.1			a.	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.2.2			b.	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.2.3			c.	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.3			3.	Pengelolaan Olahraga Rekreasi					
				400.4.3.1			a.	Olahraga Massal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.4.3.2			b.	Olahraga Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.3.3			c.	Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.4			4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga					
				400.4.4.1			a.	Olahraga Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.4.2			b.	Olahraga Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.4.3			c.	Olahraga Prestasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.4.4			d.	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.5			5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus					
				400.4.5.1			a.	Olahraga Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.5.2			b.	Layanan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.4.6			6.	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga					
				400.4.6.1			a.	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.6.2			b.	Penghargaan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.7			7.	Pembibitan dan IPTEK Olahraga					
				400.4.7.1			a.	Pembibitan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.7.2			b.	Kompetisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.7.3			c.	IPTEK Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.8			8.	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan					
				400.4.8.1			a.	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.8.2			b.	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.9			9.	Industri dan Promosi Olahraga					
				400.4.9.1			a.	Industri Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.4.9.2			b.	Promosi Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.10			10.	Olahraga Prestasi					
				400.4.10.1			a.	Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.10.2			b.	Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.10.3			c.	Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.11			11.	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga					
				400.4.11.1			a.	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.11.2			b.	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.11.3			c.	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.5			E.	KEPEMUDAAN						
			400.5.1			1.	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.2			2.	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda					

				400.5.2.1			a.	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.2.2			b.	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.2.3			c.	Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.2.1			d.	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.3			3.	Peningkatan Wawasan Pemuda					
				400.5.3.1			a.	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.3.2			b.	Wawasan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.3.3			c.	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.4			4.	Peningkatan Kapasitas Pemuda					
				400.5.4.1			a.	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.4.2			b.	Kapasitas IPTEK	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.5.4.3			c.	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.5			5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)					
				400.5.5.1			a.	Pengkajian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.5.2			b.	Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.5.3			c.	Pendayagunaan (Fasilitasi)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.6			6.	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda					
				400.5.6.1			a.	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.6.2			b.	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.7			7.	Kewirausahaan					
				400.5.7.1			a.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.5.7.2			b.	Pengaderan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.7.3			c.	Perintisan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.8			8.	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan					
				400.5.8.1			a.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.2			b.	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.3			c.	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.4			d.	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.9			9.	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda					

				400.5.9.1			a.	Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.9.2			b.	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.5.10			10.	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda					
				400.5.10.1			a.	Kemitraan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.10.2			b.	Penghargaan Pemuda	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.6			F.	KEBUDAYAAN						
			400.6.1			1.	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.2			2.	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman					
				400.6.2.1			a.	Registrasi Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.2.2			b.	Pelindungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.2.3			c.	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.6.2.4			d.	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.3			3.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman					
				400.6.3.1			a.	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.2			b.	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.3			c.	Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.4			d.	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.4			4.	Sejarah dan Nilai Budaya					
				400.6.4.1			a.	Sejarah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.2			b.	Pemetaan Nilai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.3			c.	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.4			d.	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.6.4.5			e.	Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.6			f.	Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.5			5.	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya					
				400.6.5.1			a.	Internalisasi Nilai Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.2			b.	Kekayaan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.3			c.	Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.4			d.	Diplomasi Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7			G.	KESEHATAN						
			400.7.1			1.	Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2			2.	Upaya Kesehatan Dasar					
				400.7.2.1			a.	Pelayanan Kedokteran Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.2			b.	Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.2.3			c.	Pelaksanaan Kesehatan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.4			d.	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.5			e.	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.6			f.	ICD 10, <i>Destistry</i> , dan <i>Stomatology</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.7			g.	Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.8			h.	Penyakit Mulut di Tingkat Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.9			i.	Pembiayaan Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.10			j.	Penggunaan Darah Rasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.11			k.	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.12			l.	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.2.13			m.	Akreditasi Puskesmas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.14			n.	Puskesmas Berprestasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3			3.	Upaya Kesehatan Rujukan					
				400.7.3.1			a.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.2			b.	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.3			c.	Pelayanan Rumah Sakit Privat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.4			d.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.5			e.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.6			f.	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.3.7			g.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.8			h.	Badan Pengawas Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.9			i.	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.3.10			j.	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.4			4.	Keperawatan dan Keteknisian Medik					
				400.7.4.1			a.	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.4.2			b.	Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.4.3			c.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.4.4			d.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.4.5			e.	Bina Pelayanan Kebidanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.7.5			5.	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan					
				400.7.5.1			a.	Mikrobiologi dan Imunologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.2			b.	Patologi dan Toksikologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.3			c.	Radiologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.4			d.	Perizinan dan Sertifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.5			e.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.6			f.	Peralatan Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.5.7			g.	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.6			6.	Kesehatan Jiwa					
				400.7.6.1			a.	Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.7.6.2			b.	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				400.7.6.3			c.	Etikolegal dan Asesmen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.7.6.4			d.	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.7.6.6			e.	Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.7.7			7.	Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra					
				400.7.7.1			a.	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.2			b.	Imunisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.3			c.	Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.4			d.	Kesehatan Matra	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.8			8.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung					
				400.7.8.1			a.	Pengendalian Tuberkulosis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.8.2			b.	Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.3			c.	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.4			d.	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.5			e.	Pengendalian Kusta dan Frambusia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.9			9.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang					
				400.7.9.1			a.	Pengendalian Malaria	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.9.2			b.	Pengendalian Arbovirosis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.9.3			c.	Pengendalian Zoonosis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.9.4			d.	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10			10.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
				400.7.10.1			a.	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.10.2			b.	Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.10.3			c.	Penyakit Kanker	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.10.4			d.	Penyakit Kronis dan Generatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.10.5			e.	Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11			11.	Penyehatan Lingkungan					
				400.7.11.1			a.	Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.11.2			b.	Pemukiman dan Tempat Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.11.3			c.	Kawasan dan Sanitasi Darurat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.11.4			d.	Higien Sanitasi Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.11.5			e.	Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.7.12			12.	Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.13			13.	Gizi					
				400.7.13.1			a.	Gizi Makro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.2			b.	Gizi Mikro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.3			c.	Gizi Klinik dan Dietetik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.4			d.	Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.5			e.	Kewaspadaan Gizi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.14			14.	Kesehatan Ibu					
				400.7.14.1			a.	Kesehatan Ibu Hamil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.2			b.	Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.3			c.	Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.14.4			d.	Keluarga Berencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.5			e.	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.15			15.	Kesehatan Anak					
				400.7.15.1			a.	Kelangsungan Hidup Bayi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.2			b.	Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.3			c.	Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.4			d.	Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.5			e.	Perlindungan Kesehatan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.16			16.	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer					
				400.7.16.1			a.	Kesehatan Tradisional Keterampilan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.16.2			b.	Kesehatan Tradisional Ramuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.16.3			c.	Kesehatan Alternatif dan Komplementer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.16.4			d.	Penapisan dan Kemitraan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.17			17.	Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				400.7.17.1			a.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.2			b.	Kapasitas Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.3			c.	Lingkungan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.4			d.	Kemitraan Kesehatan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.5			e.	Kesehatan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.6			f.	Kesehatan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.18			18.	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan					

				400.7.18.1			a.	Harga Obat Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.18.2			b.	Pengadaan Obat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.18.3			c.	Perbekalan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.19			19.	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan					
				400.7.19.1			a.	Alat Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.19.2			b.	Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.19.3			c.	Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.20			20.	Kefarmasian					
				400.7.20.1			a.	Pelayanan Kefarmasian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.20.2			b.	Farmasi Klinis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.20.3			c.	Farmasi Komunitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.20.4			d.	Penggunaan Obat Rasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.21			21.	Produksi dan Distribusi Kefarmasian					
				400.7.21.1			a.	Obat Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.21.2			b.	Kosmetik dan Makanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.21.3			c.	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.21.4			d.	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.22			22.	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan					
				400.7.22.1			a.	Surat Keterangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.22.2			b.	Sertifikasi dan Perizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.23			23.	Penanggulangan Krisis Kesehatan					
				400.7.23.1			a.	Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.23.2			b.	Tanggap Darurat dan Pemulihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.23.3			c.	Pemantauan dan Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.23.4			d.	Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.23.5			e.	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.24			24.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan					
				400.7.24.1			a.	Tersedianya Data NHA Setiap Tahun	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.24.2			b.	Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.25			25.	Intelegensia Kesehatan					
				400.7.25.1			a.	Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.25.2			b.	Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.7.26			26.	Kesehatan Haji					
				400.7.26.1			a.	Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.26.2			b.	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.27			27.	Promosi Kesehatan					
				400.7.27.1			a.	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.2			b.	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.3			c.	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.4			d.	Hari Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.28			28.	Data dan Informasi					
				400.7.28.1			a.	Statistik Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.28.2			b.	Analisis dan Diseminasi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.28.3			c.	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.7.29			29.	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen					
				400.7.29.1			a.	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.29.2			b.	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.29.3			c.	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.29.4			d.	Obat Asli Indonesia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30			30.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya					
				400.7.30.1			a.	Penilaian Keamanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.30.2			b.	Standardisasi Produk Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.30.3			c.	Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.7.30.4			d.	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.30.5			e.	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.31			31.	Rekam Medis		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		400.8			H.	AGAMA DAN KEPERCAYAAN						
			400.8.1			1.	Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.8.2			2.	Fasilitasi					
				400.8.2.1			a.	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/ Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.2.2			b.	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.2.3			c.	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.2.4			d.	Kasus Keagamaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				400.8.2.5			e.	Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.8.3			3.	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME					
				400.8.3.1			a.	Kelembagaan dan Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.3.2			b.	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.3.3			c.	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.3.4			d.	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.8.3.5			e.	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9			I.	SOSIAL						
			400.9.1			1.	Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.2			2.	Kesejahteraan Sosial Anak					
				400.9.2.1			a.	Kesejahteraan Sosial Anak Balita	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.2			b.	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.9.2.3			c.	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.4			d.	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.5			e.	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.3			3.	Rehabilitasi Sosial					
				400.9.3.1			a.	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.3.2			b.	Kelembagaan dan Advokasi Sosial	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.3.3			c.	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.4			4.	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial					
				400.9.4.1			a.	Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.9.4.2			b.	Tuna Susila dan Korban <i>Trafficking</i> Perempuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.4.3			c.	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.4.4			d.	Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.5			5.	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.6			6.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia					
				400.9.6.1			a.	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.6.2			b.	Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.6.3			c.	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.7			7.	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.9.8			8.	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.9			9.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
				400.9.9.1		a.	Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Kesenjangan Sosial, Penguatan Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.2		b.	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.3		c.	Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.4		d.	Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.10			10.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
				400.9.10.1		a.	Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.10.2		b.	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.9.10.3			c.	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.10.4			d.	Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.11			11.	Jaminan Sosial					
				400.9.11.1			a.	Seleksi dan Verifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.2			b.	Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.3			c.	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.4			d.	Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.12			12.	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial					
				400.9.12.1			a.	Ketahanan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.2			b.	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.9.12.3			c.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.4			d.	Kemitraan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.5			e.	Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.13			13.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil					
				400.9.13.1			a.	Persiapan Pemberdayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.2			b.	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.3			c.	Penggalian dan Pengembangan Potensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.4			d.	Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.5			e.	Kerja Sama Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.14			14.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan					

				400.9.14.1			a.	Identifikasi dan Analisis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.2			b.	Pengembangan Kapasitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.3			c.	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.4			d.	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.5			e.	Bantuan Langsung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.6			f.	Kerja Sama Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.15			15.	Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial					
				400.9.15.1			a.	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.15.2			b.	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.15.3			c.	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.9.15.4			d.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.10			J.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
			400.10.1			1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.2			2.	Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
				400.10.2.1			a.	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.2			b.	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.3			c.	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.4			d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.5			e.	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.3			3.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat					
				400.10.3.1			a.	Lembaga Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.10.3.2			b.	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.3			c.	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.4			d.	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.5			e.	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.4			4.	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
				400.10.4.1			a.	Budaya Nusantara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.4.2			b.	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.4.3			c.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.4.4			d.	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.4.5			e.	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.5			5.	Usaha Ekonomi Masyarakat					

				400.10.5.1			a.	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.5.2			b.	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.5.3			c.	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.5.4			d.	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.5.5			e.	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.6			6.	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan					
				400.10.6.1			a.	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.2			b.	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.3			c.	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.4			d.	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.10.6.5			e.	Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.7			7.		Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.11			K.	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN						
			400.11.1			1.		Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.2			2.		Pertamanan				
				400.11.2.1			a.	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.2.2			b.	Taman Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.2.3			c.	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.3			3.		Pemakaman				
				400.11.3.1			a.	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.3.2			b.	Pemakaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.3.3			c.	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.11.4			4.	Jalur Hijau					
				400.11.4.1			a.	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.4.2			b.	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.11.4.3			c.	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.5			5.	Peran Serta Masyarakat		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.6			6.	Pengawasan dan Penindakan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.7			7.	Pengelolaan Data		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.11.8			8.	Evaluasi dan Pelaporan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.12			L.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
			400.12.1			1.	Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.12.2			2.	Pendaftaran Penduduk					
				400.12.2.1			a.	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				400.12.2.2			b.	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.3			c.	Pindah Datang Penduduk Antarnegara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.4			d.	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.5			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.12.3			3.	Pencatatan Sipil					
				400.12.3.1			a.	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.2			b.	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.3			c.	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.4			d.	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				400.12.3.5			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.12.4			4.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
				400.12.4.1			a.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.2			b.	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.3			c.	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.4			d.	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.5			e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.12.5			5.	Pengembangan Kebijakan Kependudukan					
				400.12.5.1			a.	Kuantitas Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.2			b.	Kualitas Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.12.5.3			c.	Mobilitas Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.4			d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.5			e.	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.12.6			6.	Penyerasian Kependudukan					
				400.12.6.1			a.	Indikator Kependudukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.2			b.	Proyeksi Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.3			c.	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.4			d.	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.5			e.	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13			M.	KELUARGA BERENCANA						
			400.13.1			1.	Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.2			2.	Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk					

				400.13.2.1			a.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.2.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.3			3.	Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk					
				400.13.3.1			a.	Penyiapan Fasilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.3.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.4			4.	Profil dan Proyeksi Penduduk					
				400.13.4.1			a.	Data Profil dan Proyeksi Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.4.2			b.	Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.5			5.	Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk					
				400.13.5.1			a.	Penetapan Sasaran Parameter	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.5.2			b.	Evaluasi Sasaran Parameter	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.6			6.	Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk					
				400.13.6.1			a.	Pemanfaatan Profil dan Proyeksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.13.6.2			b.	Pemanfaatan Parameter	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.7			7.	Pengembangan Sistem					
				400.13.7.1			a.	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.7.2			b.	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.8			8.	Pengembangan Materi					
				400.13.8.1			a.	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.8.2			b.	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.9			9.	Monitoring dan Evaluasi					
				400.13.9.1			a.	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.9.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.10			10.	Analisis Sosial		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.11			11.	Analisis Ekonomi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.12			12.	Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.13.13			13.	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.14			14.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.15			15.	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.16			16.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah				
				400.13.16.1		a.	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.16.2		b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.17			17.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.18			18.	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.19			19.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta				
				400.13.19.1		a.	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.19.2		b.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.20			20.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur				

							Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan					
				400.13.20.1			a.	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.20.2			b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.21			21.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan					
				400.13.21.1			a.	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.21.2			b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.22			22.	Kesertaan Keluarga Berencana Pria					
				400.13.22.1			a.	Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.22.2			b.	Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.23			23.	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.13.24			24.	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.25			25.	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.26			26.	Pelebagaan Bina Keluarga Balita dan Anak				
				400.13.26.1		a.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.26.2		b.	Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.27			27.	Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak				
				400.13.27.1		a.	Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.27.2		b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.28			28.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja				
				400.13.28.1		a.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.28.2		b.	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.29			29.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja				

				400.13.29.1			a.	Monitoring Bina Ketahanan Remaja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.29.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.30			30.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
				400.13.30.1			a.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.30.2			b.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.31			31.	Pelebagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
				400.13.31.1			a.	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.31.2			b.	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.32			32.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
				400.13.32.1			a.	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.32.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.13.33			33.	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.34			34.	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.35			35.	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga				
				400.13.35.1		a.	Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.35.2		b.	Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.36			36.	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.37			37.	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.38			38.	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
				400.13.38.1		a.	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.38.2		b.	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.39			39.	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				

				400.13.39.1			a.	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.39.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.40			40.	Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi					
				400.13.40.1			a.	Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.40.2			b.	Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.41			41.	Advokasi dan Pencitraan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.42			42.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi					
				400.13.42.1			a.	Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.42.2			b.	Sarana Produksi Media Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.42.3			c.	Produk Media Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.43			43.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.13.44			44.	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota					
				400.13.44.1			a.	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.44.2			b.	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.45			45.	Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah					
				400.13.45.1			a.	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.45.2			b.	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.46			46.	Tenaga Lini Lapangan					
				400.13.36.1			a.	Pengembangan Tenaga Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.36.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.47			47.	Institusi Masyarakat Pedesaan					
				400.13.47.1			a.	Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.47.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.13.48			48.	Mekanisme Operasional Lini Lapangan					
				400.13.48.1			a.	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.48.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.49			49.	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan					
				400.13.49.1			a.	Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.49.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.50			50.	Pengumpulan dan Pengolahan Data		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.51			51.	Analisis dan Evaluasi					
				400.13.51.1			a.	Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.51.2			b.	Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.52			52.	Sistem Aplikasi dan Bank Data					
				400.13.52.1			a.	Pengembangan Sistem Aplikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.13.52.2			b.	Pengelolaan Bank Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.53			53.	Infrastruktur Teknologi Informasi					
				400.13.53.1			a.	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.53.2			b.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.54			54.	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi					
				400.13.54.1			a.	Dokumentasi dan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.54.2			b.	Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14			N.	HUBUNGAN MASYARAKAT						
			400.14.1			1.	Keprotokolan					
				400.14.1.1			a.	Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.1.2			b.	Buku Tamu Keprotokolan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.1.3			c.	Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.14.1.4			d.	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.2			2.		Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.3			3.		Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.4			4.		Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan				
				400.14.4.1			a.	Kliping Koran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.4.2			b.	Brosur/ <i>Leaflet</i> /Poster/ Plakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.4.3			c.	Pengumuman/Pemberit aan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.5			5.		Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah				
				400.14.5.1			a.	Hubungan Antarlembaga Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.2			b.	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				400.14.5.3			c.	Hubungan dengan Perusahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.4			d.	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.5			e.	Forum Kehumasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.6			f.	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.6			6.	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.7			7.	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.8			8.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.9			9.	Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.10			10.	Pameran/Sayemara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.11			11.	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			400.14.12			12.	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
VI.	500				PEREKONOMIAN							
		500.1			A.	KETAHANAN PANGAN						
			500.1.1			1.	Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah					
			500.1.2			2.	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
				500.1.2.1			a.	Ketersediaan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.2.2			b.	Akses Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.2.3			c.	Kerawanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.3			3.	Distribusi dan Cadangan Pangan					
				500.1.3.1			a.	Distribusi Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.3.2			b.	Harga Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.3.3			c.	Cadangan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.4			4.	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan					

				500.1.4.1			a.	Konsumsi Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.4.2			b.	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.4.3			c.	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.5			5.	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan					
				500.1.5.1			a.	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.5.2			b.	Penghargaan Ketahan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.6			6.	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.7			7.	Bimbingan Teknis		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.8			8.	Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.2			B.	PERDAGANGAN						
			500.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.2			2.	Perdagangan Dalam Negeri					
				500.2.2.1			a.	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.2.2.2			b.	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.3			c.	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.4			d.	Informasi Perusahaan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.5			e.	Pelaku Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.6			f.	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.7			g.	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.8			h.	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.9			i.	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.10			j.	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.11			k.	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.2.2.12			l.	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.13			m.	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.14			n.	Informasi Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.15			o.	Informasi Hasil Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.16			p.	Barang Strategis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.17			q.	Bahan Pokok Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3			3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					
				500.2.3.1			a.	Kelembagaan dan Informasi Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.2			b.	Kerja Sama Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.3			c.	Perumusan dan Penerapan Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.4			d.	Tata Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.5			e.	Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.2.3.6			f.	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.7			g.	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.8			h.	Fasilitas Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.9			i.	Produk Pertambangan dan Aneka Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.10			j.	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.11			k.	Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.12			l.	Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.13			m.	Sarana dan Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.14			n.	Kelembagaan dan Penilaian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.15			o.	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.16			p.	Pengawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.2.3.17			q.	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.18			r.	Balai Pengujian UTTP	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.4			4.	Perdagangan Berjangka Komoditi					
				500.2.4.1			a.	Pengkajian Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.2			b.	Pengawasan Transaksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.3			c.	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.4			d.	Pengkajian Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.5			e.	Pengembangan Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.6			f.	Sistem Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.7			g.	Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.8			h.	Pengawasan Pasar Lelang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.9			i.	Pengawasan Sistem Gudang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.2.5			5.	Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.6			6.	Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3			C.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
			500.3.1			1.	Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.2			2.	Kelembagaan Koperasi dan UKM				
				500.3.2.1		a.	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.2		b.	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.3		c.	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.4		d.	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.5		e.	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.6		f.	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.7		g.	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.3.2.8			h.	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.3			3.	Produksi					
				500.3.3.1			a.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.2			b.	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.3			c.	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.4			d.	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.5			e.	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.4			4.	Pembiayaan					
				500.3.4.1			a.	Program Pendanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.2			b.	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.3			c.	Urusan Permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.4			d.	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.5			e.	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.3.4.6			f.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.5			5.	Pemasaran dan Jaringan Usaha					
				500.3.5.1			a.	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.2			b.	Ekspor dan Impor	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.3			c.	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.4			d.	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.5			e.	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.6			f.	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.6			6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
				500.3.6.1			a.	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.2			b.	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.3			c.	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.3.6.4			d.	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.5			e.	Advokasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.3.7			7.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha					
				500.3.7.1			a.	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.2			b.	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.3			c.	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.4			d.	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.5			e.	Pengembangan Sistem Bisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.8			8.	Pengkajian Sumber Daya UKMK					
				500.3.8.1			a.	Penelitian Koperasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.8.2			b.	Penelitian UKM	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.8.3			c.	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.3.8.4			d.	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.9			9.	Kerja Sama Hubungan Antarlembaga		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.10			10	Pedagang Kaki Lima (PKL)					
				500.3.10.1			a.	Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.10.2			b.	Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.11			11.	Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.4			D.	KEHUTANAN						
			500.4.1			1.	Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.4.2			2.	Penyuluhan					
				500.4.2.1			a.	Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.2			b.	Materi Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.3			c.	Program Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.4			d.	Sarana Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.2.5			e.	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.6			f.	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.7			g.	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.8			h.	Diseminasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.2.9			i.	Evaluasi dan Laporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.4.3			3.	Planologi Kehutanan					
				500.4.3.1			a.	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.2			b.	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.3			c.	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.4			d.	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.5			e.	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.4.3.6			f.	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.7			g.	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.8			h.	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.9			i.	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.10			j.	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.11			k.	Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.12			l.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.13			m.	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.14			n.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.4.3.15			o.	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.3.16			p.	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.4.4			4.	Bina Usaha Kehutanan					
				500.4.4.1			a.	Data Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.2			b.	SK HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.3			c.	Kerja Sama	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.4			d.	Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.5			e.	Perpanjangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.6			f.	Modal dan Peralatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.4.4.7			g.	Investasi Industri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.8			h.	Peralatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.9			i.	Tenaga Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.10			j.	Pemegang Saham	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.11			k.	Neraca Perusahaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.12			l.	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.13			m.	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.14			n.	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.15			o.	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.16			p.	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.4.4.17			q.	Produksi Kayu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.18			r.	Produksi Nonkayu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.19			s.	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.20			t.	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.21			u.	Industri Nonkayu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.22			v.	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.23			w.	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.24			x.	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.4.4.25			y.	Pemblokiran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.26			z.	Denda	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.27			aa.	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.28			ab.	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.29			ac.	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.30			ad.	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.31			ae.	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.32			af.	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.33			ag.	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.34			ah.	Produksi Hutan Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.4.35			ai.	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.36			aj.	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.37			ak.	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.38			al.	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.39			am.	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.40			an.	Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.41			ao.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.42			ap.	Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.43			aq.	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.44			ar.	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.45			as.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				500.4.4.46			at.	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.47			au.	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.48			av.	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.4.49			aw.	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.4.5			5.	Standardisasi dan Lingkungan					
				500.4.5.1			a.	Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.2			b.	Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.3			c.	Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.4			d.	Pemasaran Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.5			e.	Pengendalian Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.5.6			f.	Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.7			g.	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.8			h.	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.9			i.	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.10			j.	Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.5.11			k.	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.4.6			6.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					
				500.4.6.1			a.	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.2			b.	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.3			c.	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.4			d.	Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.6.5			e.	Pengamanan Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.6			f.	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.7			g.	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.8			h.	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.9			i.	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.10			j.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.11			k.	Bina Cinta Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.12			l.	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.6.13			m.	Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.4.7			7.	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial					
				500.4.7.1			a.	Pengelolaan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.7.2			b.	Kebun Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.3			c.	Tegakan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.4			d.	Pengadaan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.5			e.	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.6			f.	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.7			g.	Pembibitan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.9			h.	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.10			i.	Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.11			j.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.12			k.	Tanaman Reboisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.13			l.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.4.7.14			m.	Perhutanan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.7.15			n.	Pengendalian Perladangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.4.8			8.	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					
				500.4.8.1			a.	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.8.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.8.3			c.	Diseminasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.8.4			d.	Gelar Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.4.8.5			e.	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5			E.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
			500.5.1			1.	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2			2.	Perikanan Tangkap					
				500.5.2.1			a.	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.2			b.	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.2.3			c.	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.4			d.	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.5			e.	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.6			f.	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.7			g.	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.8			h.	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.9			i.	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.10			j.	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.11			k.	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.12			l.	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.13			m.	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.2.14			n.	Kenelayanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.15			o.	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.2.16			p.	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.3			3.	Perikanan Budi Daya					
				500.5.3.1			a.	Potensi Lahan dan Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.2			b.	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.3			c.	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.4			d.	Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.5			e.	Informasi dan Distribusi Pembenihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.6			f.	Budidaya Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.7			g.	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.3.8			h.	Sertifikasi Budi Daya Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.9			i.	Data dan Statistik Perikanan Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.10			j.	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.11			k.	Perlindungan Lingkungan Budi Daya				
				500.5.3.12			l.	Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.13			m.	Kewirausahaan Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.14			n.	Pelayanan Usaha Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.15			o.	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.16			p.	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4			4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
				500.5.4.1			a.	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.2			b.	Pengembangan Produk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.4.3			c.	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.4			d.	Industri Pengolahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.5			e.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.6			f.	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.7			g.	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.8			h.	Pengembangan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.9			i.	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.10			j.	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.11			k.	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.12			l.	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.13			m.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.4.14			n.	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.15			o.	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.16			p.	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.17			q.	Pengembangan Ekspor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.18			r.	Pengendalian Impor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.19			s.	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.20			t.	Pelayanan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.21			u.	Kemitraan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.22			v.	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.23			w.	Investasi dan Permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.24			x.	Informasi dan Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5			5.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					

				500.5.5.1			a.	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.2			b.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.3			c.	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.4			d.	Informasi dan Evaluasi Spasial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.5			e.	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.6			f.	Konservasi Wawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.7			g.	Konservasi Jenis Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.5.5.8			h.	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.9			i.	Mitigasi Bencana Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.10			j.	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.11			k.	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.12			l.	Rehabilitasi dan Reklamasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.13			m.	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.14			n.	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.15			o.	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.5.5.16			p.	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.17			q.	Akses Permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.18			r.	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.19			s.	Sosial Budaya Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.20			t.	Pengembangan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6			6.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
				500.5.6.1			a.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.2			b.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.3			c.	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.4			d.	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.5.6.5			e.	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.6			f.	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.7			g.	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.8			h.	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.9			i.	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.10			j.	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.11			k.	Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.12			l.	Pengawakan Kapal Pengawas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.5.6.13			m.	Sistem Pemantauan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.14			n.	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.15			o.	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.16			p.	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.17			q.	Penyidikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.18			r.	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.19			s.	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.6.20			t.	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.7			7.	Karantina Ikan					
				500.5.7.1			a.	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				500.5.7.2			b.	Penahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.3			c.	Pengasingan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.4			d.	Pengamatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.5			e.	Pengakuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.6			f.	Penolakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.7			g.	Pemusnahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.8			h.	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.9			i.	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.5.7.10			j.	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.11			k.	Pemasukan Formulir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.12			l.	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.13			m.	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.14			n.	Surat Perintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.15			o.	Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.16			p.	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.17			q.	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.18			r.	Pengawasan Peraturan Perkarantinaa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				500.5.7.19			s.	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.20			t.	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.21			u.	Lokasi Karantina	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.6			F.	PERTANIAN						
			500.6.1			1.	Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.2			2.	Perlindungan Hortikultura					
				500.6.2.1			a.	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.2.2			b.	Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.2.3			c.	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.2.4			d.	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.3			3.	Perbenihan Hortikultura					
				500.6.3.1			a.	Penilaian Varietas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.6.3.2			b.	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.3.3			c.	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.4			4.	Perluasan dan Pengelolaan Lahan					
				500.6.4.1			a.	Basis Data Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.4.2			b.	Pengendalian Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.4.3			c.	Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.4.4			d.	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.4.5			e.	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.5			5.	Pengelolaan Air Irigasi					
				500.6.5.1			a.	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.5.2			b.	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.5.3			c.	Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.6.5.4			d.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.6			6.		Pembiayaan Pertanian				
				500.6.6.1			a.	Data Informasi Pembiayaan Program	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.6.2			b.	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.6.3			c.	Pembiayaan Agribisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.6.4			d.	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.7			7.		Pupuk Pestisida				
				500.6.7.1			a.	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.2			b.	Pupuk Anorganik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.3			c.	Pestisida	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.4			d.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.8			8.		Alat dan Mesin Pertanian				
				500.6.8.1			a.	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.6.8.2			b.	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.8.3			c.	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.9			9.	Perbenihan Tanaman Pangan					
				500.6.9.1			a.	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9.2			b.	Produksi Benih Serealia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9.3			c.	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9.4			d.	Kelembagaan Benih	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.10			10.	Budi Daya Serealia					
				500.6.10.1			a.	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.2			b.	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.3			c.	Jagung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.4			d.	Serealia Lain	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.11			11.	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi					

				500.6.11.1			a.	Kedelai	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.11.2			b.	Ubi Kayu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.11.3			c.	Aneka Kacang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.12			12.	Tanaman Pangan					
				500.6.12.1			a.	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.12.2			b.	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.12.3			c.	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.12.4			d.	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.13			13.	Pascapanen Tanaman Pangan					
				500.6.13.1			a.	Padi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.13.2			b.	Jagung dan Serealia alin	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.13.3			c.	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.13.4			d.	Aneka Umbi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.6.14			14.	Pengolahan Hasil Pertanian					
				500.6.14.1			a.	Tanaman Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.14.2			b.	Hortikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.14.3			c.	Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.14.4			d.	Peternakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.15			15.	Mutu dan Standardiasi					
				500.6.15.1			a.	Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.15.2			b.	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.15.3			c.	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.15.4			d.	Kerja Sama dan Harmonisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.16			16.	Pengembangan Usaha dan Investasi					
				500.6.16.1			a.	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.16.2			b.	Investasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.6.16.3			c.	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.16.4			d.	Promosi Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.17			17.	Pemasaran Domestik					
				500.6.17.1			a.	Informasi Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.17.2			b.	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.17.3			c.	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.17.4			d.	Jaringan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.18			18.	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat					
			500.6.19			19.	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					
				500.6.19.1			a.	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.19.2			b.	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.6.20			20.	Diseminasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.21			21.	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian					
				500.6.21.1			a.	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.21.2			b.	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.22			22.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.23			23.	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.24			24.	Data Penelitian dan Pengembangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.25			25.	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.26			26.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
				500.6.26.1			a.	Hak Cipta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.2			b.	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.6.26.3			c.	Hak Paten Biasa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.4			d.	Hak Merek	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.5			e.	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.6			f.	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.7			g.	Permohonan HaKI yang Ditolak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.6.27			27.	Pelayanan Perizinan Pertanian					
				500.6.27.1			a.	Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.27.2			b.	Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.27.3			c.	Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)				
			500.6.28			28.	Pelayanan Hukum					
				500.6.28.1			a.	Sertifikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.28.2			b.	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.6.29			29.	Karantina Pertanian					
				500.6.29.1			a.	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.29.2			b.	Karantina Hewan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.6.30			30.	Bimbingan Teknis		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.31			31.	Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.7			G.	PETERNAKAN						
			500.7.1			1	Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7.2			2.	Peternakan dan Kesehatan Hewan					

				500.7.2.1			a.	Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.2			b.	Pakan Ternak	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.3			c.	Budi Daya Ternak	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.4			d.	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan (Permanen), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan (Permanen), Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.7.2.5			e.	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen (Permanen), Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitari dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (Permanen), Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7.3			3.	Bimbingan Teknis		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7.4			4.	Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.8			H.	PERKEBUNAN						
			500.8.1			1.	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.2			2.	Tanaman Semusim					
				500.8.2.1			a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.2.2			b.	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.8.2.3			c.	Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.2.4			d.	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.3			3.	Tanaman Rempah dan Penyegar					
				500.8.3.1			a.	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.3.2			b.	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.3.3			c.	Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.3.4			d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.4			4.	Tanaman Tahunan					
				500.8.4.1			a.	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.4.2			b.	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.4.3			c.	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.4.4			d.	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.8.5			5.	Perlindungan Perkebunan					
				500.8.5.1			a.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.5.2			b.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.5.3			c.	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.5.4			d.	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.6			6.	Pascapanen dan Pembinaan Usaha					
				500.8.6.1			a.	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.6.2			b.	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.6.3			c.	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.6.4			d.	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.8.7			7.	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.8			8.	Evaluasi Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9			I.	PERINDUSTRIAN					
			500.9.1			1.	Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.2			2.	Iklim Usaha dan Kerja Sama				
				500.9.2.1		a.	Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.2.2		b.	Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.2.3		c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.2.4		d.	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.3			3.	Promosi Industri				
				500.9.3.1		a.	Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.3.2		b.	Promosi Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.3.3		c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.9.3.4			d.	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.4			4.	Standarisasi dan Teknologi					
				500.9.4.1			a.	Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.4.2			b.	Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.4.3			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.5			5.	Hak atas Kekayaan Intelektual					
				500.9.5.1			a.	Industri Manufaktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.9.5.2			b.	Industri Agro	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.9.5.3			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.9.5.4			d.	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.9.6			6.	Industri Hijau					
				500.9.6.1			a.	Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.9.6.2			b.	Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.6.3			c.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.6.4			d.	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.7			7.	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.8			8.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.9			9.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.10			10.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.11			11.	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.12			12.	Standardisasi					
				500.9.12.1			a.	Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.12.2			b.	Penyiapan Penerapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.9.12.3			c.	Infrastruktur Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.13			13.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri					
				500.9.13.1			a.	Kebijakan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.13.2			b.	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.13.3			c.	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.14			14.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup					
				500.9.14.1			a.	Industri Hijau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.14.2			b.	Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.14.3			c.	Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.15			15.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual					
				500.9.15.1			a.	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.15.2			b.	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.9.15.3			c.	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.16			16.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.10			J.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
			500.10.1			1.	Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.2			2.	Rekomendasi Kegeologian					
				500.10.2.1			a.	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.2.2			b.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.2.3			c.	Pertambangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.2.4			d.	Panas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.2.5			e.	Geosains	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.2.6			f.	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.2.7			g.	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.10.3			3.	Penelitian Kegeologian					
				500.10.3.1			a.	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.2			b.	Administrasi Tenaga Penelitian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.3			c.	Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.4			d.	Log-Book Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.5			e.	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.6			f.	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.7			g.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.8			h.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.3.9			i.	Survei Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.10.4			4.	Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian					
				500.10.4.1			a.	Sumber Daya Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.4.2			b.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.4.3			c.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.4.4			d.	Survei Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.4.5			e.	Konservasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.5			5.	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi					
				500.10.5.1			a.	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.5.2			b.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.5.3			c.	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas, serta Kebakaran Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.5.4			d.	Survei Geologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.6			6.	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.6.1			a.	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.2			b.	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.3			c.	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.4			d.	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.5			e.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.6			f.	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.7			g.	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.6.8			h.	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.10.7			7.	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.7.1			a.	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.7.2			b.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk Presentasi Makalah, Publikasi Makalah, Pembukaan Data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.7.3			c.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (Publikasi Makalah, Analisa Laboratorium, <i>Reprocessing</i>), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.7.4			d.	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.7.5			e.	Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.7.6			f.	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.7.7			g.	Partisipasi <i>Interest</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.7.8			h.	Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.10.8			8.	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.8.1			a.	Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan, serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Pen andasahan), Pengawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.8.2			b.	Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.8.3			c.	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.10.9			9.	Teknik dan Lingkungan					
				500.10.9.1			a.	Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.2			b.	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.3			c.	Buku Register <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)/ <i>Procedure Qualification Record</i> (PQR)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.4			d.	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.5			e.	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.9.6			f.	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.7			g.	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.8			h.	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.9.9			i.	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.9.10			j.	Usaha Penunjang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.10			10.	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.10.1			a.	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.10.2			b.	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.10.3			c.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.10.4			d.	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.10.11			11.	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi					

				500.10.11.1			a.	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.2			b.	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.3			c.	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.4			d.	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.5			e.	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.6			f.	Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.11.7			g.	<i>Road Map</i> di Bidang EBT	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.12			12.	Panas Bumi					
				500.10.12.1			a.	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.2			b.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.3			c.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.4			d.	Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.12.5			e.	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.6			f.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.7			g.	Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specification</i> (WPS) dan <i>Procedure Qualification Record</i> (PQR) dan Kualifikasi Juru Las	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.8			h.	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.9			i.	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.10			j.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.11			k.	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.12			l.	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.13			m.	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.14			n.	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.12.15			o.	Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.16			p.	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.12.17			q.	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.10.13			13.	Bioenergi					
				500.10.13.1			a.	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.2			b.	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.3			c.	Penerbitan Rekomendasi Ekspor- Impor	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.4			d.	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.5			e.	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.6			f.	Database Pengusahaan Bioenergi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.7			g.	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik				
				500.10.13.8			h.	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.13.9			i.	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.14			14.	Aneka Energi					
				500.10.14.1			a.	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.14.2			b.	Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.14.3			c.	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.14.4			d.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.14.5			e.	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.15			15.	Konservasi Energi					
				500.10.15.1			a.	Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.2			b.	Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.15.3			c.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajamen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.4			d.	Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.5			e.	Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.6			f.	Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.7			g.	Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.8			h.	Profil Investasi Efisiensi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.9			i.	<i>Investment Grade Audit</i> (IGA)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.15.10			j.	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.16			16.	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE					
				500.10.16.1			a.	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.16.2			b.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.16.3			c.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.16.4			d.	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.17			17.	Bina Program Tenaga Listrik					
				500.10.17.1			a.	Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: Dokumen Grant/Hibah/ <i>Loan Agreement</i> Luar Negeri, <i>Monitoring Loan</i> Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi, dan Pendanaan Tenaga Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.17.2			b.	Pengembangan Listrik Pedesaan, antara lain: Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan, Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu				
				500.10.17.3			c.	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.18			18.	Bina Usaha Ketenagalistikan					
				500.10.18.1			a.	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.18.2			b.	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.18.3			c.	Hubungan Komersial Tenaga Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.18.4			d.	Perlindungan Konsumen Listrik, antara lain: Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)				
			500.10.19			19.		Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
				500.10.19.1			a.	Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.19.2			b.	Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.19.3			c.	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.19.4			d.	Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi <i>Clean Development Mechansim</i> (CDM)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.20			20.	Sertifikasi					
				500.10.20.1			a.	Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.20.2			b.	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.20.3			c.	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.20.4			d.	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.20.5			e.	Registrasi Sertifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.21			21.		Akreditasi Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.22			22.		Standarisasi Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.23			23.		Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
				500.10.23.1			a.	Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.23.2			b.	Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.23.3			c.	Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.23.4			d.	Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.24			24.		Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
				500.10.24.1			a.	Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.24.2			b.	Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.24.3			c.	Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.24.4			d.	Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.24.5			e.	Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.25			25.	Bina Program Mineral dan Batu Bara					
				500.10.25.1			a.	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.2			b.	Rencana Induk Mineral dan Batu Bara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.3			c.	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.4			d.	Data dan Informasai Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.5			e.	Pelaporan Program Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.6			f.	Perencanaan, Penyiapan, dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batu Bara melalui Lelang Reguler	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.25.7			g.	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.8			h.	Perencanaan Produksi Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.25.9			i.	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.26			26.	Pembinaan Pengusahaan Mineral					
				500.10.26.1			a.	Ketenagakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.2			b.	Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.3			c.	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.4			d.	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.5			e.	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.6			f.	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.7			g.	Perizinan Usaha Pertambangan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.26.8			h.	Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.9			i.	Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.10			j.	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.11			k.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris pada Perusahaan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.12			l.	Teguran kepada Pengusahaan Kontrak Karya (KK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.13			m.	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.14			n.	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.15			o.	Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.26.16			p.	Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.26.17			q.	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.27			27.	Pembinaan Pengusahaan Batu Bara					
				500.10.27.1			a.	Ketenagakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.2			b.	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.3			c.	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batu Bara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.4			d.	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.5			e.	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.6			f.	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara PKP2B, IUP, hingga Laporan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Penjualan Pertambangan Batu Bara				
				500.10.27.7			g.	Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.8			h.	Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.9			i.	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Aset Perusahaan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.10			j.	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.11			k.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.27.12			l.	Teguran kepada Pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.13			m.	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Batu Bara	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.14			n.	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Swal Sampul dengan Rancangan Akhir	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.15			o.	Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.16			p.	Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.27.17			q.	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.28			28.	Penerimaan Negara					
				500.10.28.1			a.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.28.2			b.	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.28.3			c.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.29			29.	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara					
				500.10.29.1			a.	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: <i>Draft</i> Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.2			b.	Pengawasan Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.3			c.	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.4			d.	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
				500.10.29.5			e.	Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.6			f.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.7			g.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.8			h.	Rekomendasi Bahan Kimia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.9			i.	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pascatambang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.29.10			j.	Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/ Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.11			k.	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan, dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.12			l.	Pengawasan Lingkungan Pertambangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.13			m.	Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.29.14			n.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.15			o.	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.16			p.	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.17			q.	Pengawasan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.18			r.	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.29.19			s.	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Teknis/Sosialisasi Pertambangan				
			500.10.30			30.		Program Penelitian dan Pengembangan				
				500.10.30.1			a.	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.2			b.	Pengembangan dan Inovasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.3			c.	Dokumen Penerapan/Pemanfaata n/Pendayagunaan/ Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/ Pengkajian/ Pengembangan/ Inovasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.4			d.	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.5			e.	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.6			f.	Pembinaan Penelitian/Pengembang an, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.10.30.7			g.	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.8			h.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.9			i.	<i>Master Proceeding/</i> Jurnal Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.10			j.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.11			k.	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.12			l.	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.30.13			m.	Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.10.31			31.	Sarana Litbang					
				500.10.31.1			a.	Administrasi Penggunaan Peralatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.31.2			b.	Log-Book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.32			32.	Afiliasi					
				500.10.32.1			a.	Proyek Percontohan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.32.2			b.	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.32.3			c.	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.32.4			d.	Penyajian Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.33			33.	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian					
				500.10.33.1			a.	Pemetaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.33.2			b.	Energi Kelautan dan Wilayah Penelitian Energi dan Wilayah Pantai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.33.3			c.	Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.10.33.4			d.	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.10.34			34.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.34.1			a.	Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.2			b.	Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.3			c.	Laboratorium	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.4			d.	<i>Study</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.5			e.	Teknologi Proses	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.6			f.	Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.34.7			g.	Teknologi Gas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.35			35.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara					
				500.10.35.1			a.	Teknologi Eksploitasi Tambang dan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

								Pengolahan Sumber Daya			pelaksanaan tugas dan fungsi	
				500.10.35.2			b.	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.35.3			c.	Teknologi Pemanfaatan Batu Bara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.10.36			36.	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan					
				500.10.36.1			a.	Energi Baru Terbarukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.36.2			b.	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.36.3			c.	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.10.36.4			d.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11			K.	PERHUBUNGAN						
			500.11.1			1.	Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.2			2.	Jaringan Prasarana dan Pelayanan					

				500.11.2.1			a.	Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.2			b.	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.3			c.	Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.4			d.	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.5			e.	Jaringan Trayek Angkutan Antarkota/Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.6			f.	Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.7			g.	Penetapan Kelas Jalan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.8			h.	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.9			i.	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.3			3.	Pengembangan Transportasi Jalan					
				500.11.3.1			a.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.3.2			b.	Pengembangan Transportasi Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.4			4.	Pengujian Kendaraan Bermotor					
				500.11.4.1			a.	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.2			b.	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.3			c.	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.4			d.	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.5			5.	Teknologi Kendaraan Bermotor					
				500.11.5.1			a.	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.2			b.	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.3			c.	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.4			d.	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.6			6.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					

				500.11.6.1			a.	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.6.2			b.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.7			7.	Perlengkapan Jalan					
				500.11.7.1			a.	Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.2			b.	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.3			c.	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.4			d.	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.5			e.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.8			8.	Angkutan Penumpang					
				500.11.8.1			a.	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.2			b.	Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.8.3			c.	Izin Trayek antar Kota antar Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.4			d.	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antar kota/ Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.5			e.	Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.6			f.	Pemberian Subsidi Angkutan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.7			g.	Angkutan Perintis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.8			h.	Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.9			9.	Angkutan Barang					
				500.11.9.1			a.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.2			b.	Tarif Angkutan Barang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.3			c.	Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.9.4			d.	Pembinaan Angkutan Barang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.5			e.	Izin Dispensasi Angkutan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.10			10.	Monitoring Operasional					
				500.11.10.1			a.	Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.10.2			b.	Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.10.3			c.	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.11			11.	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
				500.11.11.1			a.	Pedoman Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.11.2			b.	Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.11.3			c.	Bimtek PPNS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.11.4			d.	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.12			12.	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
				500.11.12.1			a.	Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.12.2			b.	Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.13			13.	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
				500.11.13.1			a.	Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.11.13.2			b.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.11.14			14.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.15			15.	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
				500.11.15.1		a.	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.15.2		b.	Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, dan Danau dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.16			16.	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.16.1		a.	Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.2		b.	Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.3		c.	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.4		d.	Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.17			17.		Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.18			18.		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
				500.11.18.1			a.	Manajemen Lalu Lintas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.18.2			b.	Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.18.3			c.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.18.4			d.	Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.19			19.		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.19.1			a.	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.19.2			b.	Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.19.3			c.	Perambuan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.20			20.	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
				500.11.20.1			a.	Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.20.2			b.	Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.21			21.	Tarif dan Keperintisan					
				500.11.21.1			a.	Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.21.2			b.	Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.22			22.	Bina Sistem Transportasi Perkotaan					
				500.11.22.1			a.	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.22.2			b.	Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Jalan Rel dan Perairan Daratan				
							c.	Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.23			23.		Lalu Lintas Perkotaan				
				500.11.23.1			a.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.23.2			b.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.23.3			c.	Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.24			24.		Angkutan Perkotaan				
				500.11.24.1			a.	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.24.2			b.	Jaringan Trayek Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.24.3			c.	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.11.25			25.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan					
				500.11.25.1			a.	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.25.2			b.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.25.3			c.	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.26			26.	Dampak Transportasi Perkotaan					
				500.11.26.1			a.	Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.26.2			b.	Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.26.3			c.	Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.26.4			d.	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.26.5			e.	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.26.6			f.	Masterplan Transportasi Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.27			27.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan					
				500.11.27.1			a.	Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.27.2			b.	Kualifikasi Unit Pengkajian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.27.3			c.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.28			28.	Pengembangan Keselamatan					
				500.11.28.1			a.	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
				500.11.28.2			b.	Harmonisasi Kebijakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.29			29.	Promosi dan Kemitraan Keselamatan					
				500.11.29.1			a.	Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.29.2			b.	Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.30			30.	Bina Keselamatan Angkutan Umum					
				500.11.30.1			a.	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.30.2			b.	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.31			31.	Audit Keselamatan					
				500.11.31.1			a.	Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.31.2			b.	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.31.3			c.	Audit Faktor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.32			32.	Inspeksi Keselamatan					
				500.11.32.1			a.	Pedoman Keselamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.32.2			b.	Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.32.3			c.	Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.33			33.	Parkir					
				500.11.33.1			a.	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.33.2			b.	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.11.33.3			c.	Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12			L.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
			500.12.1			1.	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.2			2.	Telekomunikasi					
				500.12.2.1			a.	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.2.2			b.	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.2.3			c.	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.2.4			d.	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.3			3.	Penyiaran					
				500.12.3.1			a.	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.3.1			b.	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.4			4.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal					
				500.12.4.1			a.	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.12.4.2			b.	Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.4.3			c.	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.4.4			d.	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.4.5			e.	Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.5			5.	Pengendalian Informatika					
				500.12.5.1			a.	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.2			b.	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.3			c.	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.4			d.	Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.6			6.	<i>e-Government</i>					
				500.12.6.1			a.	Tata Kelola <i>e-Government</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.2			b.	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.12.6.3			c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Government</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.4			d.	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.5			e.	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.7			7.	<i>e-Business</i>					
				500.12.7.1			a.	Tata Kelola <i>e-Business</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.7.2			b.	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.7.3			c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Business</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.7.4			d.	Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.12.8			8.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat					
				500.12.8.1			a.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.12.8.2			b.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.9			9.	Pemberdayaan Industri Informatika					
				500.12.9.1			a.	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.2			b.	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.3			c.	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.4			d.	Industri Konten Multimedia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.10			10.	Keamanan Informasi					
				500.12.10.1			a.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.2			b.	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.3			c.	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.4			d.	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.12.10.5			e.	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.12.11			11.	Komunikasi Publik					
				500.12.11.1			a.	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.11.2			b.	Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.11.3			c.	Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.12			12.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
				500.12.12.1			a.	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.12.2			b.	Informasi Perekonomian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.12.3			c.	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.13			13.	Pengelolaan Media Publik					
				500.12.13.1			a.	Media Cetak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.13.2			b.	Media <i>Online</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.13.3			c.	Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.12.14			14.	Kemitraan Komunikasi					
				500.12.14.1			a.	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.14.2			b.	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.14.3			c.	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.15			15.	Infrastruktur Informatika					
				500.12.15.1			a.	Jaringan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.15.2			b.	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.15.3			c.	Keamanan Informatika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.12.16			16.	Sistem dan Data					
				500.12.16.1			a.	Portal dan Konten	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.16.2			b.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.12.16.3			c.	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.12.17			17.	Pusat Kerja Sama					
				500.12.17.1			a.	Kerja Sama Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.17.2			b.	Kerja Sama Bilateral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.18			18.	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat					
				500.12.18.1			a.	Pelayanan Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.18.2			b.	Hubungan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.18.3			c.	Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.12.19			19.	Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.13			M.	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
			500.13.1			1.	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.2			2.	Pengembangan Destinasi Wisata					

				500.13.2.1			a.	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.2			b.	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.3			c.	Industri Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.4			d.	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.5			e.	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.3			3.	Pemasaran Pariwisata					
				500.13.3.1			a.	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.2			b.	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.3			c.	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.4			d.	Pencitraan Indonesia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.4			4.	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya					
				500.13.4.1			a.	Pengembangan Industri Perfilman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.13.4.2			b.	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.4.3			c.	Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.5			5.	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK					
				500.13.5.1			a.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.5.2			b.	Desain dan Arsitektur	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.5.3			c.	Kerja Sama dan Fasilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.6			6.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
				500.13.6.1			a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.2			b.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.3			c.	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.4			d.	Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.14			N.	STATISTIK						

			500.14.1			1.	Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2			2.	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi					
				500.14.2.1			a.	Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.2.2			b.	Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada <i>Stakeholder</i> dan Sumber Data (<i>Leaflet</i> , Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								(TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Rule</i> Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba				
				500.14.2.3			c.	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.2.4			d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.2.5			e.	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.2.6			f.	Diseminasi Hasil Sensus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.3			3.	Survei					

				500.14.3.1			a.	Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.2			b.	Persiapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.3			c.	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.4			d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Fokumen (Penerimaan/ Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.5			e.	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara,	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/ Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi				
				500.14.3.6			f.	Diseminasi Hasil Survei	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.4			4.	Konsolidasi Data Statistik					
				500.14.4.1			a.	Kompilasi Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.2			b.	Analisis Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.3			c.	Penyusunan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.4			d.	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15			O.	KETENAGAKERJAAN						
			500.15.1			1.	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.2			2.	Perencanaan Tenaga Kerja					
				500.15.2.1			a.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.2.2			b.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.15.3			3.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi					
				500.15.3.1			a.	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.3.2			b.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.3.3			c.	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.3.4			d.	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.3.5			e.	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.4			4.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja					
				500.15.4.1			a.	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.4.2			b.	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.4.3			c.	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.4.4			d.	Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.5			5.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan					

				500.15.5.1			a.	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.2			b.	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.3			c.	Tenaga Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.4			d.	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.6			6.	Bina Pemagangan					
				500.15.6.1			a.	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.2			b.	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.3			c.	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.4			d.	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.7			7.	Produktivitas dan Kewirausahaan					
				500.15.7.1			a.	Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.7.2			b.	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.15.7.3			c.	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.7.4			d.	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.8			8.	Pengembangan Pasar Kerja					
				500.15.8.1			a.	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.2			b.	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.3			c.	Bursa Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.4			d.	Analisis Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.9			9.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri					
				500.15.9.1			a.	Antarkerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.2			b.	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.3			c.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.4			d.	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			500.15.10			10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal					
				500.15.10.1			a.	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.2			b.	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.3			c.	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.4			d.	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.11			11.	Standardisasi Profesi					
				500.15.11.1			a.	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.11.2			b.	Pembakuan Akreditasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.12			12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi					
				500.15.12.1			a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.12.2			b.	Perjanjian Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.12.3			c.	Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.15.12.4			d.	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.13			13.	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial					
				500.15.13.1			a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.13.2			b.	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.13.3			c.	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.14			14.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
				500.15.14.1			a.	Pengupahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.14.2			b.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.15			15.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial					
				500.15.15.1			a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.15.2			b.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.15.15.3			c.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.16			16.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
				500.15.16.1			a.	Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.16.2			b.	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.16.3			c.	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.17			17.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
				500.15.17.1			a.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.2			b.	Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.3			c.	Kerja Sama Lintas Sektoral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.4			d.	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.18			18.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					

				500.15.18.1			a.	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.2			b.	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.3			c.	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.4			d.	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.5			e.	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.19			19.	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.20			20.	Bina Penegakan Hukum					
				500.15.20.1			a.	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.15.20.2			b.	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.15.20.3			c.	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.15.20.4			d.	Kerja Sama Penegakan Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.15.21			21.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
				500.15.21.1			a.	Analisis dan Standardisasi bidang K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.2			b.	Hasil Kajian, Perekrayaan dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.3			c.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.4			d.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.22			22.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
				500.15.22.1			a.	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.2			b.	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.3			c.	Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.15.22.4			d.	Kerja Sama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.5			e.	Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.6			f.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.16			P.	PENANAMAN MODAL						
			500.16.1			1.	Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.2			2.	Perencanaan Penanaman Modal					
				500.16.2.1			a.	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.2			b.	Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.3			c.	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.4			d.	Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.3			3.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal					

				500.16.3.1			a.	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.2			b.	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.3			c.	Pemberdayaan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.4			d.	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.5			e.	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.6			f.	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.4			4.	Promosi Penanaman Modal					
				500.16.4.1			a.	Pengembangan Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.2			b.	Analisis Strategi Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.3			c.	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.4			d.	Promosi Sektoral	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.5			e.	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.16.4.6			f.	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.5			5.	Kerja Sama Penanaman Modal					
				500.16.5.1			a.	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.5.2			b.	Kerja Sama Regional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.5.3			c.	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6			6.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				500.16.6.1			a.	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.6.2			b.	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.6.3			c.	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.6.4			d.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.16.6.5			e.	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.16.6.6			f.	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.7			7.	Pelayanan Penanaman Modal					
				500.16.7.1			a.	Pelayanan Aplikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.7.2			b.	Pelayanan Perizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.7.3			c.	Pelayanan Konsultasi Perizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.7.4			d.	Pelayanan Nonperizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.7.5			e.	Pelayanan Fasilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.17			Q.	PERTANAHAN						
			500.17.1			1.	Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.17.2			2.	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan					
				500.17.2.1			a.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.17.2.2			b.	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.17.2.3			c.	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.17.2.4			d.	Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.17.3			3.	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah					
				500.17.3.1			a.	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.17.3.2			b.	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.17.3.3			c.	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.17.4			4.	Sengketa Tanah					
				500.17.4.1			a.	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.17.4.2			b.	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.18			R.	TRANSMIGRASI						

			500.18.1			1.	Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.2			2.	Penyediaan Tanah Transmigrasi					
				500.18.2.1			a.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.2.2			b.	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.2.3			c.	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.2.4			d.	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.3			3.	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi					
				500.18.3.1			a.	Penyiapan Lahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.3.2			b.	Penyiapan Sarana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.18.3.3			c.	Penyiapan Prasarana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.3.4			d.	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.4			4.	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi					
				500.18.4.1			a.	Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.2			b.	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.3			c.	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.4			d.	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.5			5.	Partisipasi Masyarakat					
				500.18.5.1			a.	Promosi dan Motivasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.5.2			b.	Kerja Sama Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				500.18.5.3			c.	Kerja Sama Antardaerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.5.4			d.	Pelayanan Investasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.6			6.	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi					
				500.18.6.1			a.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.2			b.	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.3			c.	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.4			d.	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.5			e.	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.7			7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat					
				500.18.7.1			a.	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.18.7.2			b.	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.7.3			c.	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.7.4			d.	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.18.8			8.	Pengembangan Usaha					
				500.18.8.1			a.	Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.8.2			b.	Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.8.3			c.	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.8.4			d.	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.18.9			9.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					
				500.18.9.1			a.	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.9.2			b.	Pengembangan Sarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.9.3			c.	Pengembangan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				500.18.9.4			d.	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.18.10			10.	Penyerasian Lingkungan					
				500.18.10.1			a.	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.2			b.	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.3			c.	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.4			d.	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
VII.	600				PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN							
		600.1			A.	PEKERJAAN UMUM						
			600.1.1			1.	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.2			2.	Penatagunaan Sumber Daya Air					
				600.1.2.1			a.	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.2.2			b.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.2.3			c.	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.1.2.4			d.	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.2.5			e.	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.1.3			3.	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air					
				600.1.3.1			a.	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.3.2			b.	Manajemen Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.3.3			c.	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.3.4			d.	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.4			4.	Pengelolaan Sumber Daya Air					
				600.1.4.1			a.	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.4.2			b.	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.4.3			c.	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.1.4.4			d.	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.5			5.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					
				600.1.5.1			a.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.5.2			b.	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.5.3			c.	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.5.4			d.	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.6			6.	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)					
				600.1.6.1			a.	Perencanaan Pengendalian Lumpur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.6.2			b.	Pemrograman Pengendalian Lumpur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.6.3			c.	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				600.1.6.4			d.	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.1.7			7.	Pengembangan Jaringan Jalan					
				600.1.7.1			a.	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.7.2			b.	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.7.3			c.	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.8			8.	Pembangunan Jalan					
				600.1.8.1			a.	Standar dan Pedoman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.8.2			b.	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.8.3			c.	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan <i>Drainage</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.8.4			d.	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.9			9.	Preservasi Jalan					
				600.1.9.1			a.	Standar dan Pedoman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.1.9.2			b.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.9.3			c.	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.9.4			d.	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.10			10.	Pengelolaan Jembatan					
				600.1.10.1			a.	Standar dan Pedoman	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.10.2			b.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.10.3			c.	Teknik Jembatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.10.4			d.	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.11			11.	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah					
				600.1.11.1			a.	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.11.2			b.	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.11.3			c.	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			600.1.12			12.	Pengaturan Jalan Tol					
				600.1.12.1			a.	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.12.2			b.	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.12.3			c.	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.12.4			d.	Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.13			13.	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman					
				600.1.13.1			a.	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.1.13.2			b.	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.1.14			14.	Pengembangan Kawasan Permukiman					
				600.1.14.1			a.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.14.2			b.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.1.14.3			c.	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.14.4			d.	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.14.5			e.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.15			15.	Pembinaan Penataan Bangunan					
				600.1.15.1			a.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.15.2			b.	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.15.3			c.	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.15.4			d.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.16			16.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				600.1.16.1			a.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.2			b.	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.3			c.	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.1.16.4			d.	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.5			e.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.6			f.	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.7			g.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.17			17.	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman					
				600.1.17.1			a.	Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.2			b.	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.3			c.	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.4			d.	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.5			e.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.6			f.	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.18			18.	Pemantauan dan Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

		600.2			B.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
			600.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.2			2.	Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
				600.2.2.1		a.	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.2.2		b.	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.2.3		c.	Kemitraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.2.3			3.	Pola Pembiayaan Perumahan				
				600.2.3.1		a.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.3.2		b.	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.3.3		c.	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.4			4.	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
				600.2.4.1		a.	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.2.4.2			b.	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.3			c.	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.4			d.	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.5			e.	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.5			5.	Perencanaan Penyediaan Perumahan					
				600.2.5.1			a.	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.5.2			b.	Analisa Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.5.3			c.	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.5.4			d.	Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.6			6.	Penyediaan Rumah Susun					
				600.2.6.1			a.	Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.6.2			b.	Penyediaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.2.6.3			c.	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.6.4			d.	Pengelolaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.7			7.	Penyediaan Rumah Khusus					
				600.2.7.1			a.	Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.2			b.	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.3			c.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.4			d.	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.5			e.	Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.6			f.	Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.7.7			g.	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.8			8.	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial					
				600.2.8.1			a.	Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.2.8.2			b.	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.8.3			c.	Fasilitasi Hunian Berimbang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.8.4			d.	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.9			9.	Investasi Infrastruktur					
				600.2.9.1			a.	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.9.2			b.	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.9.3			c.	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.9.4			d.	Pasar Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.10			10.	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
				600.2.10.1			a.	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.10.2			b.	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				600.2.10.3			c.	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.10.4			d.	Manajemen Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.11			11.	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi					
				600.2.11.1			a.	Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.2			b.	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.3			c.	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.4			d.	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.12			12.	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
				600.2.12.1			a.	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.2			b.	Penerapan Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.3			c.	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.2.12.4			d.	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.13			13.	Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
				600.2.13.1			a.	Peningkatan Kerja Sama	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.13.2			b.	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.2.14			14.	Peningkatan Jasa Konstruksi					
				600.2.14.1			a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.14.2			b.	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.15			15.	Penerapan Teknologi Konstruksi					
				600.2.15			a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.16			b.	Pengembangan Materi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.17			c.	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			600.2.16			16.	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)					
				600.2.16.1			a.	Antarsektor	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.16.2			b.	Antarwilayah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.2.17			17.	Pengembangan Kawasan Strategis					
				600.2.17.1			a.	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.17.2			b.	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.2.18			18.	Pengembangan Kawasan Perkotaan					
				600.2.18.1			a.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.18.2			b.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.18.3			c.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.2.18.4			d.	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.18.5			e.	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.19			19.	Pemantauan dan Evaluasi		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.3			C.	TATA RUANG (TATA KOTA)						
			600.3.1			1.	Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.3.2			2.	Perencanaan					
				600.3.2.1			a.	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.2.2			b.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.2.3			c.	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.2.4			d.	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.2.5			e.	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				600.3.2.6			f.	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.2.7			g.	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.3.3			3.	Pemanfaatan dan Pengendalian					
				600.3.3.1			a.	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.3.3.2			b.	Izin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.3.3.3			c.	Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.3.4			4.	Pemetaan					
				600.3.4.1			a.	Peta Dasar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.4.2			b.	Survei Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.3.4.3			c.	Survei Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				600.3.4.4			d.	Survei Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		600.4			D.	LINGKUNGAN HIDUP						
			600.4.1			1.	Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.2			2.	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
				600.4.2.1			a.	Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.4.2.2			b.	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.3			3.	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
				600.4.3.1			a.	Evaluasi Penerapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.3.2			b.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.4			4.	Ekonomi Lingkungan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.5			5.	Dampak Lingkungan					

				600.4.5.1			a.	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.5.2			b.	Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.5.3			c.	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.6			6.	Pemantauan dan Pengawasan					
				600.4.6.1			a.	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.6.2			b.	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.6.3			c.	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.6.4			d.	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.7			7.	Evaluasi dan Pengembangan					
				600.4.7.1			a.	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.7.2			b.	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.7.3			c.	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.7.4			d.	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			600.4.8			8.	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan					
				600.4.8.1			a.	Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.2			b.	Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.3			c.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.4			d.	Keamanan Hayati	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.5			e.	Pengendalian Kerusakan Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.9			9.	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat					
				600.4.9.1			a.	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.9.2			b.	Rawa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.10			10.	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer					
				600.4.10.1			a.	Perangkat Mitigasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.10.2			b.	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.4.10.3			c.	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.10.4			d.	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.11			11.	Adaptasi Perubahan Iklim					
				600.4.11.1			a.	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.11.2			b.	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.12			12.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun					
				600.4.12.1			a.	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.12.2			b.	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.12.3			c.	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.13			13.	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun					

				600.4.13.1			a.	Pengumpulan dan Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.13.2			b.	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.13.3			c.	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.13.4			d.	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.14			14.	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3					
				600.4.14.1			a.	Pemantauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.14.2			b.	Tanggap Darurat dan Pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.15			15.	Pengelolaan Sampah					
				600.4.15.1			a.	Pembatasan Sampah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.15.2			b.	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.15.3			c.	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.15.4			d.	Penetapan Pemenang Adipura	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			600.4.16			16.	Hukum Administrasi Lingkungan					
				600.4.16.1			a.	Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.16.2			b.	Penataan Hukum Administrasi Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.17			17.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan					
				600.4.17.1			a.	Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.4.17.2			b.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.18			18.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan					
				600.4.18.1			a.	Penyidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.18.2			b.	Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.18.3			c.	Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.19			19.	Komunikasi Lingkungan					
				600.4.19.1			a.	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.4.19.2			b.	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.20			20.	Penguatan Inisiatif Masyarakat					
				600.4.20.1			a.	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.20.2			b.	Kearifan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.21			21.	Peningkatan Peran Masyarakat					
				600.4.21.1			a.	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.21.2			b.	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.22			22.	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan					
				600.4.22.1			a.	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.22.2			b.	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.23			23.	Data dan Informasi Lingkungan					
				600.4.23.1			a.	Pengelolaan Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.23.2			b.	Pengelolaan Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				600.4.23.3			c.	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.23.4			d.	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.24			24.	Kelembagaan Lingkungan					
				600.4.24.1			a.	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.24.2			b.	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.25			25.	Standarisasi dan teknologi					
				600.4.25.1			a.	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.25.2			b.	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.25.3			c.	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.26			26.	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan					
				600.4.26.1			a.	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.26.2			b.	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Eselon III	Tidak memiiki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
VIII.	700				PENGAWASAN							
		700.1			A.	PENGAWASAN INTERNAL						
			0700.1.1			1.	Rencana Pengawasan					

				700.1.1.2			a.	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.1.3			b.	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.1.4			c.	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.1.5			d.	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.1.6			e.	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			0700.1.2			2.	Pelaksanaan Pengawasan					
				700.1.2.1			a.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				700.1.2.2			b.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.3			c.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.4			d.	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.5			e.	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.6			f.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.7			g.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.8			h.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.9			i.	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

IX.	800				KEPEGAWAIAN							
		800.1			A.	SUMBER DAYA MANUSIA						
			800.1.1			1.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
				800.1.1.1			a.	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.1.2			b.	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.1.3			c.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.1.4			d.	Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2			2.	Formasi dan Pengadaan Pegawai					
				800.1.2.1			a.	Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus				
				800.1.2.2			b.	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.3			c.	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.4			d.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.5			e.	Pengangkatan ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.6			f.	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.7			g.	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.8			h.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.3			3	Mutasi Pegawai					
				800.1.3.1			a.	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimban gan Kepala BKN				
				800.1.3.2			b.	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jab atan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.3			c.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.4			d.	Perubahan Data Dasar/Status/Keduduk an Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.5			e.	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.6			f.	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.4			4.	Pengembangan Karir					
				800.1.4.1			a.	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/ Kursus/Magang/Ujian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								Dinas/Praktek Kerja di Instansi Lain/Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta				
				800.1.4.2			b.	Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.3			c.	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.4			d.	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.5			e.	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.5			5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara					
				800.1.5.1			a.	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.5.2			b.	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.5.3			c.	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6			6.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
				800.1.6.1			a.	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.2			b.	Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.3			c.	Pemberhentian dengan Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.4			d.	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.5			e.	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.6			f.	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								Pejabat Negara dan Janda/Dudanya				
			800.1.7			7.	Bantuan Hukum		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.8			8.	Status dan Kedudukan Pegawai					
				800.1.8.1			a.	Status Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.2			b.	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.3			c.	Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.4			d.	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.9			9.	Sistem Informasi Kepegawaian					
				800.1.9.1			a.	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.2			b.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.9.3			c.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.4			d.	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.10			10.	Pengawasan dan Pengendalian					
				800.1.10.1			a.	Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.2			b.	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.3			c.	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.4			d.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.5			e.	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.6			f.	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11			11.	Administrasi Pegawai					

				800.1.11.1			a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.2			b.	Cuti Sakit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.3			c.	Cuti Bersalin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.4			d.	Cuti Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.5			e.	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.6			f.	Cuti Besar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.7			g.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.8			h.	Karpeg/KPE/Karis/Kar su	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.11.9			i.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.10			j.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.11			k.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.12			l.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.13			m.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12			12.	Kesejahteraan Pegawai					
				800.1.12.1			a.	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.2			b.	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.3			c.	Tabungan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.4			d.	Bantuan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				800.1.12.5			e.	Pakaian Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.6			f.	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.7			g.	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.8			h.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.9			i.	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.10			j.	Rekam Medis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.13			13.	Administrasi Perseorangan					
				800.1.13.1			a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.2			b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.3			c.	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.13.4			d.	Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.5			e.	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.14			14.	Penilaian Kompetensi					
				800.1.14.1			a.	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.14.2			b.	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		800.2			B.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
			800.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.2			2.	Pendidikan dan Pelatihan					
				800.2.2.1			a.	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.2			b.	Pedoman-Pedoman Kediklatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.3			c.	Kurikulum-Kurikulum Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.4			d.	Modul-Modul Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				800.2.2.5			e.	Panduan Fasilitator	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.6			f	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.7			g.	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.8			h.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.9			i.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.3			3.	Widyaiswara					
				800.2.3.1			a.	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.2			b.	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.3			c.	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.4			d.	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.5			e.	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.6			f.	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

			800.2.4			4.	Penyelenggaraan Diklat					
				800.2.4.1			a.	Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.2			b.	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.3			c.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.4			d.	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.5			e.	Sistem Informasi Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.6			f	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.7			g.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.5			5.	Alumni		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
IX.	800				KEPEGAWAIAN							
		800.1			A.	SUMBER DAYA MANUSIA						
			800.1.1			1.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
				800.1.1.1			a.	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan				
				800.1.1.2			b.	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.1.3			c.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.1.4			d.	Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2			2.	Formasi dan Pengadaan Pegawai					
				800.1.2.1			a.	Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.2			b.	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								Pengumuman Kelulusan ASN				
				800.1.2.3			c.	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.4			d.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.5			e.	Pengangkatan ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.6			f.	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.7			g.	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.2.8			h.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.3			3	Mutasi Pegawai					
				800.1.3.1			a.	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.3.2			b.	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.3			c.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.4			d.	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.5			e.	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.6			f.	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.4			4.	Pengembangan Karir					
				800.1.4.1			a.	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi Lain/Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.2			b.	Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.4.3			c.	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.4			d.	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.5			e.	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.5			5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara					
				800.1.5.1			a.	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.5.2			b.	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.5.3			c.	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6			6.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
				800.1.6.1			a.	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.6.2			b.	Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.3			c.	Pemberhentian dengan Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.4			d.	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.5			e.	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.6.6			f.	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.7			7.	Bantuan Hukum		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.8			8.	Status dan Kedudukan Pegawai					
				800.1.8.1			a.	Status Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.8.2			b.	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.3			c.	Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.4			d.	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.9			9.	Sistem Informasi Kepegawaian					
				800.1.9.1			a.	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.2			b.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.3			c.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.4			d.	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.10			10.	Pengawasan dan Pengendalian					

				800.1.10.1			a.	Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.2			b.	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.3			c.	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.4			d.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.5			e.	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.6			f.	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11			11.	Administrasi Pegawai					
				800.1.11.1			a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.2			b.	Cuti Sakit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.11.3			c.	Cuti Bersalin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.4			d.	Cuti Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.5			e.	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.6			f.	Cuti Besar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.7			g.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.8			h.	Karpeg/KPE/Karis/Kar su	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.9			i.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.10			j.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				800.1.11.11			k.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.12			l.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.11.13			m.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12			12.	Kesejahteraan Pegawai					
				800.1.12.1			a.	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.2			b.	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.3			c.	Tabungan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.4			d.	Bantuan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.5			e.	Pakaian Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.6			f.	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.7			g.	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				800.1.12.8			h.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.9			i.	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.1.12.10			j.	Rekam Medis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.13			13.	Administrasi Perseorangan					
				800.1.13.1			a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.2			b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.3			c.	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.4			d.	Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.13.5			e.	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.14			14.	Penilaian Kompetensi					
				800.1.14.1			a.	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit Kerja Terkait

											pelaksanaan tugas dan fungsi	
				800.1.14.2			b.	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		800.2			B.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
			800.2.1			1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.2			2.	Pendidikan dan Pelatihan					
				800.2.2.1			a.	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.2			b.	Pedoman-Pedoman Kediklatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.3			c.	Kurikulum-Kurikulum Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.4			d.	Modul-Modul Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.5			e.	Panduan Fasilitator	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.6			f	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.7			g.	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				800.2.2.8			h.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.2.9			i.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.3			3.	Widyaiswara					
				800.2.3.1			a.	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.2			b.	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.3			c.	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.4			d.	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.5			e.	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.3.6			f.	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4			4.	Penyelenggaraan Diklat					
				800.2.4.1			a.	Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.2			b.	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.3			c.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				800.2.4.4			d.	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.5			e.	Sistem Informasi Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.6			f	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				800.2.4.7			g.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.5			5.	Alumni		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
X	900				KEUANGAN							
		900.1			A.	KEUANGAN DAERAH						
			900.1.1			1.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)					
				900.1.1.1			a.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.1.2			b.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.1.3			c.	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				900.1.1.4			d.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.2			2.	Penyusunan Anggaran					
				900.1.2.1			a.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.2.2			b.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.2.3			c.	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.2.4			d.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3			3.	Pelaksanaan Anggaran					
				900.1.3.1			a.	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.2			b.	Pendapatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.3			c.	Belanja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.4			d.	Pembiayaan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				900.1.3.5			e.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.6			f.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.7			g.	Daftar Gaji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.8			h.	Kartu Gaji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.9			i.	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.3.10			j.	Laporan Keuangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4			4.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri					
				900.1.4.1			a.	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.2			b.	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.3			c.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.4			d.	Dokumen <i>Loan Agreemeent</i> (PHLN), antara lain: <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								<i>Opinion</i> , Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>				
				900.1.4.5			e.	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.6			f	Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.7			g.	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.8			h.	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.9			i.	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of Contract</i> , <i>Withdrawal Authorization</i> (WA)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				900.1.4.10			j.	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.11			k.	<i>Report/Laporan</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.12			l.	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.13			m.	<i>Completion Report/Annual Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.4.14			n.	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.5			5.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.6			6.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)					
				900.1.6.1			a.	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.6.2			b.	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

				900.1.6.3			c.	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.6.4			d.	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.7			7.	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan					
				900.1.7.1			a	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.7.2			b.	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.1.: <i>Copy</i> Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				900.1.7.3			c.	Buku Rekening Bank	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.7.4			d.	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.7.5			e.	Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.8			8.	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan					
				900.1.8.1			a.	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.8.2			b.	Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.9			9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

							Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
			900.1.10			10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				

				900.1.10.1			a	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.10.2			b.	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.10.3			c.	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.10.4			d.	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.11			11.	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah					
				900.1.11.1			a	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

								Republik Indonesia atas Laporan Keuangan				
				900.1.11.2			b.	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.11.3			c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.11.4			d.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.12			12.	Anggaran Daerah					
				900.1.12.1			a	Anggaran Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.12.2			b.	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.13			13.	Pendapatan dan Investasi Daerah					
				900.1.13.1			a	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
				900.1.13.2			b.	Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.13.3			c.	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Prosedur dan Kriteria, Fasilitas Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah				
				900.1.13.4			d.	Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitas serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.13.5			e.	Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah				
			900.1.14			14.		Fasilitasi Dana Perimbangan				
				900.1.14.1			a.	Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.2			b.	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus				
				900.1.14.3			c.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.4			d.	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				900.1.14.5			e.	Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.15			15.	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
				900.1.15.1			a.	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.15.2			b.	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

								Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
				900.1.15.3			c.	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.15.4			d.	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

				900.1.15.5			e.	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID